

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 98 TAHUN 2022
TENTANG
MASTERPLAN PASURUAN SMART
CITY TAHUN 2022-2031

SISTEMATIKA MASTERPLAN PASURUAN SMART CITY

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persentase penduduk yang tinggal di kota baik itu secara global maupun untuk Indonesia sendiri dari tahun ke tahun kian meningkat. Berdasarkan data dan proyeksi yang dilakukan oleh BPS, persentase penduduk yang tinggal di kota pada tahun 2020 mencapai 56,7% dari total penduduk keseluruhan dan pada tahun 2035 nanti meningkat menjadi 66.6% atau sekitar 203 juta jiwa. Jumlah penduduk kota yang sangat banyak ini tentunya kemudian menjadi suatu tantangan bagi banyak pihak khususnya pemerintah sebab jika tidak ditangani dengan baik, masalah yang akan disebabkan oleh jumlah penduduk yang sangat besar ini bisa saja mempengaruhi stabilitas nasional.

Berbagai macam kemungkinan masalah yang bisa terjadi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk kota antara lain kemacetan, kurangnya fasilitas transportasi publik yang layak, perubahan iklim, degradasi lingkungan, kriminalitas, dan sebagainya. Kemunculan masalah-masalah ini menjadi tidak terelakan dalam suatu perkembangan kota dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya yang semakin masif. Ditambah dengan tren standar kualitas hidup manusia yang juga semakin tinggi seiring waktu seperti tempat tinggal yang layak (*liveable*) dan berkelanjutan (*sustainable*), maka sebuah solusi yang bisa menjawab permasalahan kota tadi semakin penting adanya. Ada perubahan yang juga sangat signifikan saat ini yaitu adanya transformasi informasi. Dampak perubahan itu yang sangat terasa saat ini adalah perkembangan dunia digital. Sebuah masa dimana banyak sekali pekerjaan manusia yang di digitalisasi karena bisa mengatasi berbagai macam masalah dan menawarkan banyak keuntungan seperti lebih efektif dan efisien. Keuntungan inilah yang kemudian berusaha diadopsi untuk mengatasi masalah perkotaan melalui konsep *smart city*.

Smart city (Kabupaten/kota cerdas) merupakan sebuah konsep dimana sebuah kota dapat memberikan dukungan pelayanan dasar bagi semua masyarakatnya menyesuaikan dengan kondisi karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut yang kompleks. Di Indonesia, dampak positif yang ditawarkan oleh konsep *smart city* sudah disadari oleh pemerintah khususnya pemerintah pusat sehingga implementasinya di banyak daerah sangat didukung dan didorong oleh pemerintah pusat sebagai penyelenggara negara. Dukungan ini penting adanya sebab implementasi pengembangan *smart city* masih harus melalui jalan yang panjang dan menghadapi banyak tantangan.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah adalah pengembangan *smart city* di beberapa destinasi pariwisata di Indonesia. Indonesia, yang merupakan negara yang kaya akan keindahan bentang alamnya, yang memiliki potensi tarikan wisatawan dari berbagai penjuru dunia, diharapkan bisa mengoptimalkan potensi tersebut melalui penerapan konsep *smart city* di kota/kabupaten lokasi wisata potensial itu. Belajar dari kesuksesan destinasi pariwisata Bali, pemerintah pun sudah menentukan 10 destinasi wisata prioritas yang berlokasi di 47 kabupaten/kota yang dimaksudkan untuk dikembangkan minimal setara dengan Bali. Untuk mencapai tujuan ini, kabupaten/kota lokasi kesepuluh destinasi pariwisata ini perlu dibuatkan *masterplan smart city* nya untuk mendukung pengalaman wisatawan yang berkunjung ke tempat yang *liveable* dan *sustainable*.

Pada tahap awal, pemerintah melalui kementerian komunikasi dan informatika (kemkominfo) sudah memulai program implementasi *smart city* melalui “Gerakan Menuju 100 Smart City” di tahun 2017. Tahap pertama program ini adalah dengan memilih 25 kabupaten/kota yang lebih dulu untuk dijadikan proyek pertama. Daerah terpilih ini didampingi oleh tenaga ahli pendamping dalam proses penyusunan *masterplan smart city* yang terdiri dari rencana jangka pendek, menengah, dan panjang hingga penyusunan buku “*quick win*” *smart city*. Produk yang kemudian dihasilkan oleh 25 daerah ini diharapkan dapat menjadi percontohan sekaligus panduan bagi daerah lain yang setelahnya juga akan ikut mengadopsi konsep pengembangan *smart city* di daerahnya. Di tahun berikutnya yaitu tahun 2018, program pendampingan pengembangan *smart city* dilanjutkan di 75 kabupaten kota yang telah terpilih juga sebelumnya. Dokumen masterplan yang dihasilkan akan tetap diawasi agar selalu relevan dengan perkembangan terkini melalui mekanisme *review* setelah 5 tahun pertama dilaksanakan selama jangka waktu 5 hingga 10 tahun kedepan.

Pemilihan 100 kabupaten/kota ini kedepannya diharapkan bisa menjadi percontohan untuk daerah lain yang akan melakukan proyek yang sama. Dengan telah adanya daerah yang sudah lebih dulu melakukan proyek ini, daerah lain pun lebih mudah dalam melakukan pengembangan *smart city* sehingga tujuan pemerintah mencanangkan program “Gerakan Menuju 100 Smart City” yakni mendorong Kota dan Kabupaten di Indonesia melakukan percepatan pembangunan dengan menggunakan konsep *smart city* bisa tercapai. Mimpi besar terwujudnya kota dan kabupaten cerdas di Indonesia pun bisa direalisasikan menuju tujuan utama Indonesia *smart nation*.

1.2 Tujuan

Proses pembangunan *smart city* merupakan usaha yang memerlukan waktu, komitmen dan perencanaan yang matang serta menyeluruh. Pembangunan *smart city* memerlukan keterlibatan semua pihak di tingkat daerah maupun di tingkat pusat, baik dari warga masyarakat, pemerintah maupun swasta.

Buku 2 ini berisi Penyusunan Masterplan *Smart city* Kota Pasuruan. Tujuan dari penyusunan buku ini menjadikan kota Pasuruan sebagai

kota cerdas dalam jangka waktu 10 tahun ke depan mulai dari tahun 2022 sampai 2031 berdasarkan permasalahan dan potensi yang ada. *Masterplan Smart city* Kota Pasuruan ini merupakan panduan bagi segenap organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan untuk mewujudkan *smart city* Kota Pasuruan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Manfaat yang ingin diraih dalam penyusunan *Masterplan Smart city* Kota Pasuruan, yaitu:

1. Meningkatkan kesiapan pembangunan *smart city* Kota Pasuruan (*smart city readiness*);
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Kota Pasuruan dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (*smart governance*);
3. Meningkatkan daya saing Kota Pasuruan melalui pembangunan citra daerah (*smart city branding*);
4. Meningkatkan produktivitas ekonomi Kota Pasuruan (*smart economy*);
5. Menjamin kelayakan hidup masyarakat Kota Pasuruan (*smart living*);
6. Mewujudkan masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual (*smart society*).
7. Mewujudkan pembangunan Kota Pasuruan yang selaras dengan kelestarian lingkungan (*smart environment*).

1.3 Landasan Hukum

Undang-undang yang menguatkan dari aspek legalitas, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-undang ini diperuntukkan untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan negara sehingga perlunya ditetapkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Tujuan dan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan terciptanya kepastian hukum. Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan 12 landasan berupa: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, keterbukaan, persamaan perlakuan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Ruang lingkup pelayanan publik terdiri dari 2 (dua) pelayanan yaitu pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif. Ruang lingkup meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
5. Peraturan Pemerintah No.96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Peraturan ini berisikan tentang ruang lingkup Pelayanan Publik, sistem pelayanan terpadu, pedoman penyusunan Standar Pelayanan, proporsi akses dan kategori kelompok Masyarakat dalam Pelayanan Berjenjang; dan pengikutsertaan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ruang lingkup pelayanan publik terdiri dari pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
7. Undang-undang bertujuan untuk menjadi acuan bagi pemerintah setempat dalam menetapkan perangkat daerah. Asas pembentukan perangkat daerah terdiri dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; intensitas urusan pemerintah dan potensi daerah; efisiensi; efektivitas; pembagian habis tugas; rentang kendali; tata kerja yang jelas dan fleksibilitas.
8. Peraturan Pemerintah No.96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
9. Peraturan ini berisikan tentang ruang lingkup Pelayanan Publik, sistem pelayanan terpadu, pedoman penyusunan Standar Pelayanan, proporsi akses dan kategori kelompok Masyarakat dalam Pelayanan Berjenjang; dan pengikutsertaan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ruang lingkup pelayanan publik terdiri dari pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau disingkat SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Tujuan dari adanya SPBE adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun

2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika. Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika merupakan hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bidang komunikasi dan informatika setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis.

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika. Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika berbentuk dinas, Bidang dan Seksi. Perangkat Daerah tersebut diklasifikasikan atas tipe A, tipe B, dan tipe C. Perangkat Daerah tipe A untuk mewadahi beban kerja yang besar, Perangkat Daerah tipe B dengan beban kerja yang sedang, dan Perangkat Daerah tipe C dengan beban kerja yang kecil. Pembagian dan penjabaran tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota, dikelompokkan berdasarkan pendekatan fungsi.
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan ini bertujuan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Pedoman evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pada instansi pusat dan pemerintah digunakan sebagai elevator internal dan elevator eksternal.
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika Instruksi presiden Republik Indonesia ini dibuat karena pengembangan ilmu pengetahuan dan telematika merupakan peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal sebagai modal dasar untuk mempersatukan bangsa dan pemberdayaan masyarakat menuju suksesnya pembangunan nasional yang berkesinambungan. Terdapat 3 (tiga) instruksi yang harus dipenuhi oleh pejabat negara dan daerah yaitu pertama melaksanakan lebih lanjut pengembangan dan pendayagunaan telematika dengan berpedoman pada kerangka kebijakan pengembangan dan pendayagunaan telematika di Indonesia.
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* Instruksi presiden republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 ini dibuat karena beberapa pertimbangan yaitu karena kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat sehingga dengan adanya teknologi komunikasi akan memudahkan dalam melakukan pengembangan terhadap *e- government*.

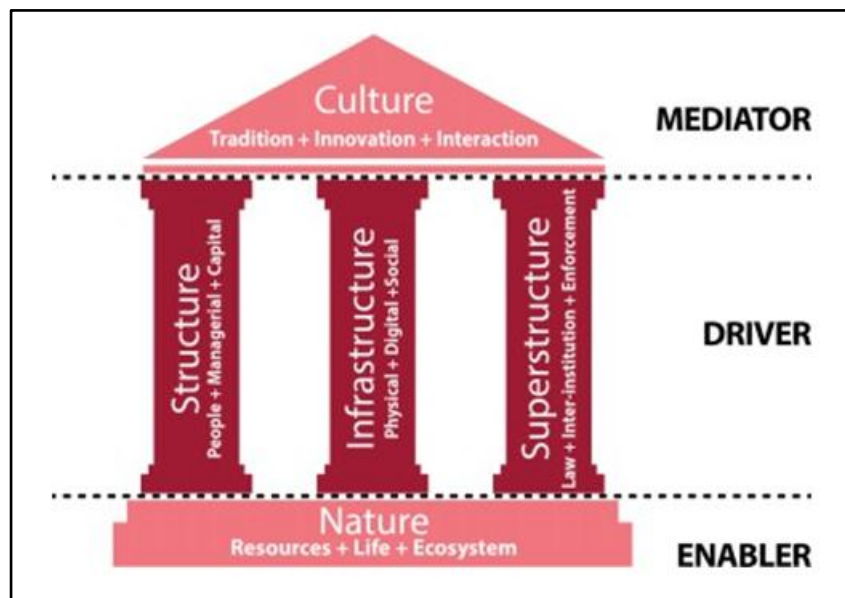
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah Latar belakang dibuatnya keputusan menteri ini adalah disebabkan karena Pemanfaatan sistem perkantoran elektronik menyebabkan suatu instansi dapat melaksanakan kegiatan administrasinya dengan lebih mudah, cepat, transparan, tertib, terpadu, produktif, akurat, aman, dan efisien, khususnya bagi kegiatan pemerintah sebagai fasilitator utama untuk melancarkan dan mendukung semua kegiatan antara instansi pemerintah dan masyarakat.
17. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 55 Tahun 2003 Tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah Panduan Pembangunan Infrastruktur portal pemerintah merupakan panduan yang dibuat dalam rangka penerapan e-government menuju good governance yang harus ditetapkan oleh setiap lembaga pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan buku panduan ini, aspek utama yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan infrastruktur portal pemerintah yaitu arah pengembangan infrastruktur informasi elektronik secara keseluruhan, arah pengembangan jasa layanan publik secara keseluruhan dan arah pengembangan jenis layanan publik serta mitra dalam pembangunan dan pengoperasiannya.
18. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Tahun Nomor 41 Tahun 2004 tentang Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi e-government. Aplikasi e-Government adalah susunan piranti lunak yang dirancang dan dibangun untuk mendukung proses layanan publik tertentu yang berkaitan langsung dengan pengguna akhir (end user), yaitu petugas instansi pemerintah maupun publik. Aplikasi e-Government dapat dibagi dalam dua kategori yaitu back office dan front office.
19. Buku Panduan Penyusunan Masterplan *Smart city* 2017 Gerakan Menuju 100 *Smart city* Buku panduan penyusunan Masterplan Smart City 2017 gerakan menuju 100 *smart city* merupakan buku panduan yang berisikan tata cara penulisan dan isi konten masterplan *smart city* yang terdiri dari analisis kondisi masa depan, analisis kesiapan smart city daerah, analisis kesenjangan strategis daerah, analisis visi *smart city* daerah, analisis strategi pembangunan *smart city* analisis kebutuhan infrastruktur pendukung *smart city* dan analisis kebutuhan aplikasi dan piranti lunak pendukung *smart city*. Adapun tujuan dibuatnya buku panduan *smart city* ini berfungsi agar terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan pengembangan *smart city* di tingkat pusat dan daerah serta menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam RPJMN dalam dokumen perencanaan *smart city* daerah. Kriteria masterplan *smart city* yang dibuat seharusnya memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan karakter dan kebutuhan spesifik daerah
 - b. Berpeluang untuk berhasil dilaksanakan yang maksimal
 - c. Objektif, tepat sasaran dan tepat guna
 - d. Berkesinambungan dalam menjaga kebutuhan ekonomi, sosial dan lingkungan
 - e. Dapat secara nyata diimplementasikan sesuai dengan

kemampuan daerah.

20. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
23. Nota Kesepakatan Antara Ditjen Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan 48 Kepala Daerah Tahun 2021 Tentang Implementasi Program Kota Cerdas (smart city) Kota/ Kabupaten Pada Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional dan Kawasan Ibu kota Negara Baru

1.4 Kerangka Pikir *Masterplan Smart City*

Pembuatan masterplan kota cerdas diawali dengan analisis terhadap 3 (tiga) kondisi yaitu visi pembangunan daerah, rencana pembangunan daerah dan kondisi daerah saat ini. Visi dan rencana pembangunan daerah dikaji dari dokumen RPJPD, RT/RW, dan RPJMD Kota Pasuruan. Kajian visi, rencana pembangunan, dan kondisi daerah terkini menghasilkan data tingkat kesiapan *smart city*. Gambar 1.1 berikut merupakan ilustrasi kerangka pemikiran yang digunakan dalam pembuatan masterplan *smart city* yang ada di Kota Pasuruan.

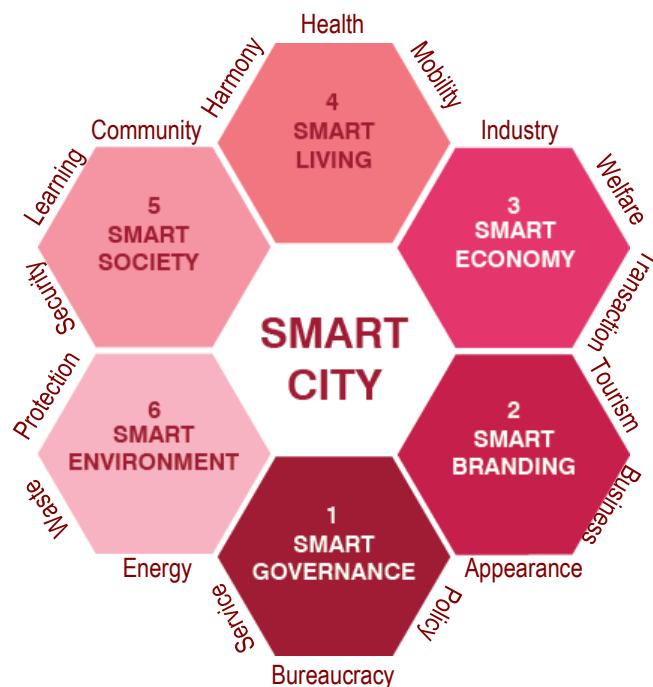


Gambar 1. *Elemen smart city readiness*

Sumber: *Citiasia.Inc*

Kesiapan *smart city* yang ada di Kota Pasuruan dianalisis menggunakan lima (5) pendekatan yaitu *nature*, struktur, infrastruktur dan suprastruktur, dan *culture*. Pada gambar 2 berikut ini terlihat bahwa pendekatan struktur terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya tata kelola. Infrastruktur terdiri dari pembangunan fisik, digital maupun sosial yang diperuntukkan untuk kepentingan umum. Pendekatan suprastruktur terdiri dari kebijakan, penyelenggaraan kebijakan dan tata laksana kelembagaan. Peninjauan modal dan kinerja dari aspek *nature*, struktur, infrastruktur,

suprastruktur, dan *culture* menunjukkan kesiapan daerah Kota Pasuruan. Secara garis besar tingkat kesiapan *nature* dengan tingkat tinggi dan sudah mencapai *full readiness*. Kesiapan *nature* dengan dijadikannya Kota Pasuruan menjadi kota yang cerdas maka domain pembangunan yang ada di Kota Pasuruan mengacu kepada 6 (enam) domain yaitu *smart living*, *smart economy*, *smart governance*, *smart society*, *smart environment* dan *smart branding*. Setiap domain tersebut selanjutnya terbagi kedalam 3 sub-domain yang menjadi dasar dari pengelompokan rencana aksi pada bahasan berikutnya. Dengan adanya sub-domain yang akan dituju maka mempermudah pemerintah dan *stakeholders* setempat membuat arahan program dan melakukan evaluasi dari program yang sudah dijalankan secara terukur dan tepat sasaran. Berikut dijabarkan secara detail penjelasan terkait domain beserta sub-domain *Smart City*.

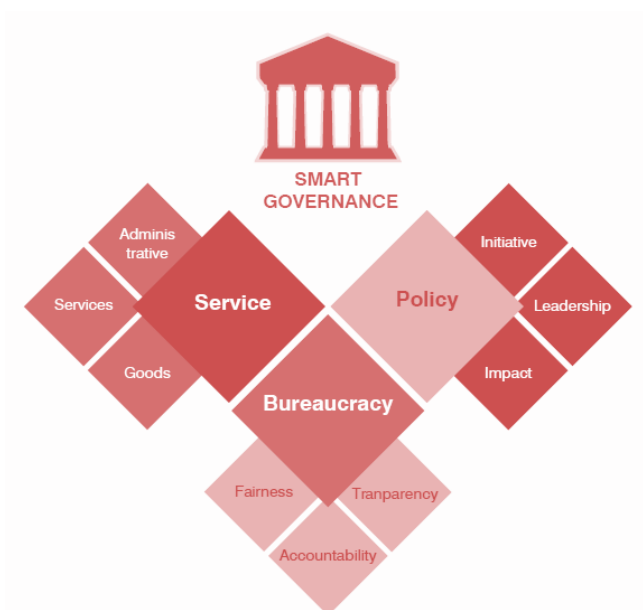


Gambar 2. Domain Smart City

Sumber: Citiasia.Inc

A. *Smart Governance*

Smart Governance adalah bagian dari domain *Smart City* yang mengatur tentang tata kelola pemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan secara cerdas sehingga mampu menghilangkan pola atau alur birokrasi tradisional yang memperlambat jalannya *business process* di wilayah kerja pemerintah. Sasaran dari *Smart Governance* adalah terwujudnya tata kelola pemerintah daerah yang bersifat efektif, efisien, komunikatif, dan selalu melakukan *improvement* terkait birokrasi melalui inovasi serta implementasi teknologi informasi dan komunikasi terkini.



Gambar 3. Sub-dimensi *Smart Governance*

Sumber: *Citiasia.Inc*

Adapun sub-domain dalam proses tata kelola pemerintahannya yakni sebagai berikut:

1. Pelayanan Publik (*Public Service*)

Peningkatan pelayanan publik berupa penyediaan pelayanan administrasi kepada masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana serta kebutuhan bahan pokok dan air bersih untuk masyarakat.

2. Manajemen Birokrasi yang Efisien (*Bureaucracy*)

Mewujudkan tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan (*fairness*), bertanggung-jawab (*accountability*) dan keterbukaan (*transparency*). Misalnya adalah sistem *e-planning*, *e-budgeting*, *e-monev* dan sebagainya.

3. Efisiensi Kebijakan Publik (*Public Policy*)

Pengembangan kebijakan publik melalui sistem informasi kebijakan daerah yang dapat diakses masyarakat dengan mudah, kapan saja dan dimana saja secara *real time* seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah, dan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah.

B. *Smart Branding*

Smart Branding adalah salah satu domain *Smart City* yang menggunakan strategi inovasi dalam memperkenalkan potensi unggul daerahnya dengan tujuan meningkatkan daya saing dan *brand awareness* pada 3 elemen sub-domainnya, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. Harapannya adalah dapat mendorong peningkatan nilai jual suatu daerah yang akan mendongkrak aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan bermasyarakat serta budaya lokal yang berdampak pada meningkatnya taraf hidup masyarakat luas.

Adapun sub-domain dalam proses peningkatan daya saing dan *brand awareness* suatu daerah adalah sebagai berikut:

1. Ekosistem Pariwisata (*Tourism Branding*)

Mengembangkan sistem terpadu pada sektor pariwisata akan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap proses peningkatan daya saing daerah, baik itu dalam skala nasional maupun internasional. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam proses peningkatan daya saing tersebut adalah dengan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang terintegrasi dengan seluruh *stakeholder* terkait mengadopsi teknologi sistem informasi dalam implementasinya.

2. Ekosistem Bisnis Daerah (*Business Branding*)

Pembangunan ekosistem bisnis daerah dapat dilakukan dengan strategi peningkatan kualitas daya jual potensi unggulan daerah seperti pada sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perairan, UMKM, ekonomi kreatif, dan budaya daerah.

3. Wajah Kota (*City Appearance Branding*)

Peningkatan kualitas wajah kota melalui penataan ulang wilayah kota yang indah, bersih, rapi serta bertaraf internasional dapat dilakukan tanpa menghilangkan nilai-nilai asli suatu daerah.



Gambar 4. Sub-dimensi Smart Branding

Sumber: Citiasia.Inc

C. *Smart Economy*

Domain *Smart Economy* dalam *Smart City* diperlukan dalam mewujudkan ekosistem perekonomian daerah yang mampu bersaing di tengah berbagai tantangan era teknologi 4.0 yang menuntut tingkat adaptasi yang tepat dan sangat cepat. *Smart Economy* memiliki tujuan mewujudkan ekosistem yang mendukung kegiatan perekonomian masyarakat yang dapat meningkatkan daya jual suatu potensi unggul daerah. Hal tersebut dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat daerah secara menyeluruh dan merata.

Terdapat tiga sub-domain pembangunan pada domain *Smart Economy* yaitu,

1. Ekosistem Industri yang Berdaya Saing (*Industri*)

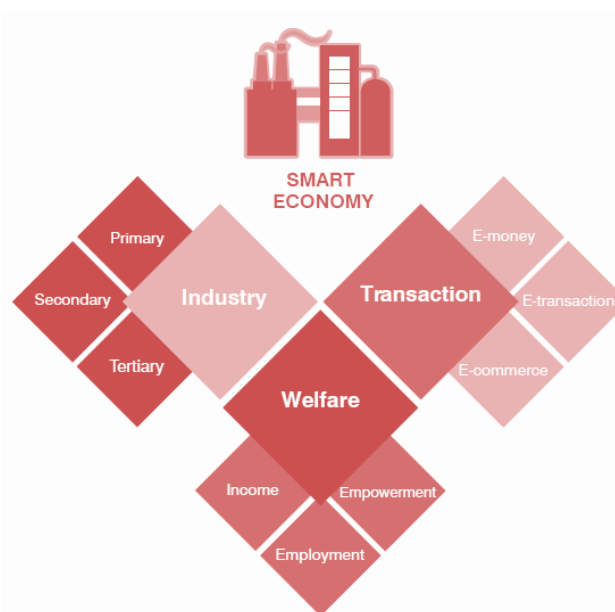
Melalui pengaplikasian konsep *Smart City*, harapannya dapat meningkatkan daya saing industri daerah baik dalam sektor industri primer, sekunder, ataupun tersier. Performa industri daerah yang baik akan berdampak baik pula terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat (*Welfare*)

Kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditingkatkan dengan mengusung beberapa rencana aksi kedepan. Peningkatan kesejahteraan ini dapat direalisasikan melalui beberapa program antara lain program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga (*income*), peningkatan penyerapan angkatan kerja (*employment*) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (*empowerment*).

3. Ekosistem Transaksi Keuangan (*Transaction*)

Pengadopsian konsep *Smart City* dalam ekosistem transaksi keuangan diharapkan dapat menciptakan ekosistem transaksi keuangan berbasis digital, masyarakat yang *bankable*, serta melahirkan banyak industri *e-commerce* dan *marketplace* dalam skala kecil maupun besar.



Gambar 5. Sub-dimensi *Smart Economy*

Sumber: Citiasia.Inc

D. *Smart Living*

Domain *Smart living* dalam *Smart City* diharapkan dapat menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di daerahnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat diketahui dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi

dalam mendukung mobilitas masyarakat. *Smart living* menyoar perwujudan suatu lingkungan tempat tinggal yang layak huni, nyaman, aman dan tentram.

Terdapat tiga sub-domain pelayanan pada dimensi *Smart Living* antara lain,

1. Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (*Harmony*)

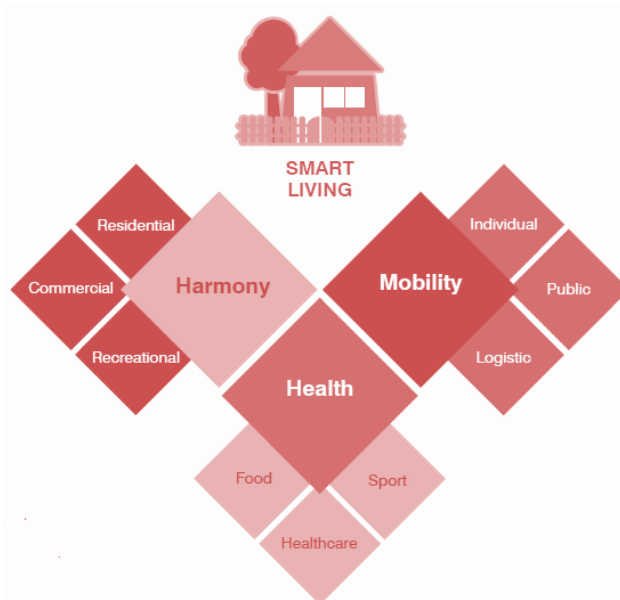
Tata ruang wilayah dalam konsep *Smart City* memiliki harmonisasi yang dapat meningkatkan mobilitas serta kenyamanan lingkungan karena mengelompokkan wilayah menjadi tiga daerah, antara lain daerah komersial dan perkantoran, daerah pemukiman, serta daerah rekreasi.

2. Jaminan Pelayanan Kesehatan (*Health*)

Adanya jaminan atas ketersediaan pelayanan kesehatan (*healthcare*), ketersediaan makanan dan minuman sehat (*food*), serta ketersediaan sarana dan prasarana olahraga (*sport*) bagi masyarakat luas.

3. Ketersediaan Sarana Transportasi (*Mobility*)

Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana transportasi publik guna mempermudah mobilitas (*mobility*) bagi individual maupun publik serta keberlangsungan akses logistik suatu daerah.



Gambar 6. Sub-dimensi *Smart Living*
 Sumber: *Citiasia.Inc*

E. *Smart Society*

Smart Society adalah domain *Smart City* yang memiliki ruang lingkup manusia sebagai unsur utamanya. Sasaran dari *Smart Society* adalah mewujudkan suatu ekosistem sosio-teknis di lingkungan masyarakat yang harmonis dan dinamis. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan serta memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat tanpa terkecuali.

Adapun sub-domain dalam proses peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada *Smart Society*, antara lain:

1. Interaksi Masyarakat yang Efisien (*Community*)

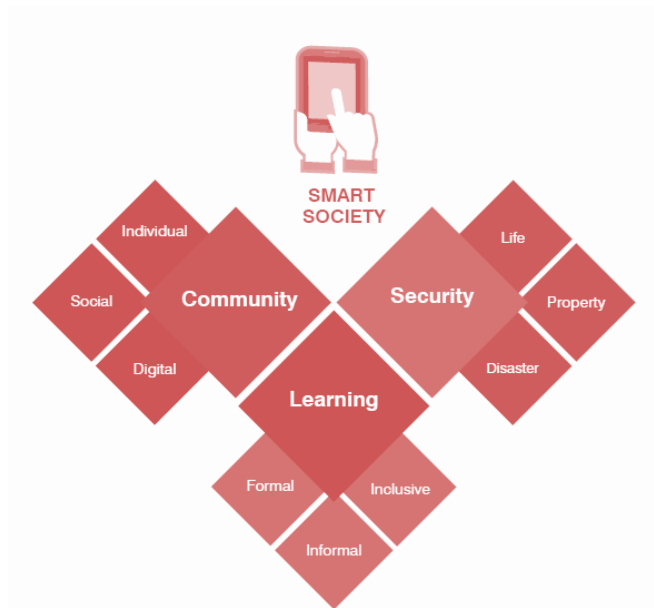
Interaksi sosial dibedakan menjadi 3 berdasarkan *drivernya*, interaksi antara individu dengan individu, interaksi antara individu dengan kelompok, dan interaksi antara kelompok dengan kelompok. Melalui interaksi-interaksi yang terjadi di area publik, diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah dengan memanfaatkan beberapa program pendukung seperti program kepemudaan, peningkatan keahlian UKM, dll.

2. Ekosistem Belajar yang Efisien (*Learning*)

Tersedianya ekosistem saling dukung antara pendidikan formal dan non-formal serta ramah bagi masyarakat berkebutuhan khusus (*disabled*). Sejalan dengan itu, pemerintah juga harus menyediakan platform edukasi bagi masyarakat seperti *smart school*, *smart campus*, *smart pesantren*, *smart training program* dan lain-lain.

3. Sistem Keamanan Masyarakat (*Security*)

Adanya sistem keamanan dan keselamatan yang diperuntukkan untuk masyarakat baik sebagai perlindungan keselamatan jiwa, properti, harta benda serta keselamatan resiko bencana dengan memanfaatkan teknologi sensor digital atau *Internet of Thing (IoT)* yang difasilitasi oleh pemerintah.



Gambar 7. Sub-dimensi *Smart Society*

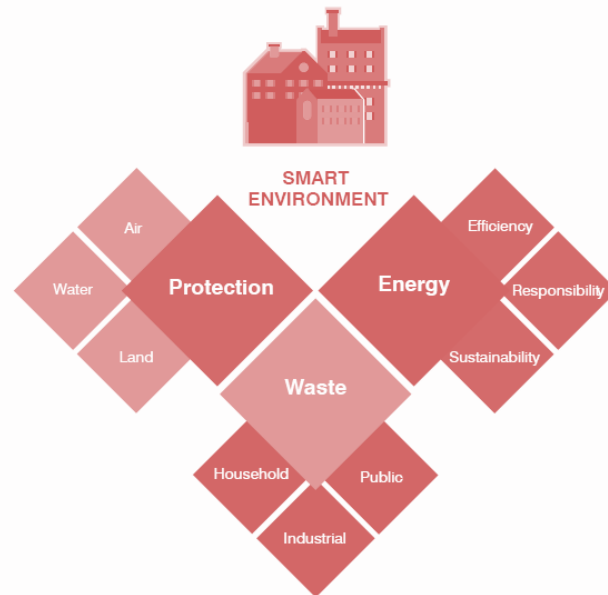
Sumber: *Citiasia.Inc*

F. *Smart Environment*

Domain *Smart Environment* merupakan domain terakhir dalam konsep *Smart City* yang berfokus pada proteksi lingkungan dengan mengadopsi teknologi pintar dalam prosesnya untuk pembangunan kota berkelanjutan. Sasaran dari *Smart Environment* adalah mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik dan bertanggung-jawab dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.

Adapun sub-domain dalam proses proteksi lingkungan dalam *Smart Environment* yakni, antara lain:

1. Program Proteksi Lingkungan (*Protection*)
Program ini merupakan strategi yang diusung guna mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air, udara, ruang terbuka hijau, restorasi sungai serta pengendalian polusi udara.
2. Tata Kelola Sampah dan Limbah (*Waste*)
Program ini merupakan program pengembangan sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga (*household*), limbah industri (*industrial*), limbah dan sampah publik (*public*) serta menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan demi mewujudkan sebuah lingkungan yang nyaman, aman, bersih, dan asri.
3. Tata Kelola Energi yang Bertanggungjawab (*Energy*)
Sebuah program yang dapat berupa pemanfaatan energi yang bertanggung jawab dan efisien serta pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan (*environmentally friendly*) serta berkelanjutan (*sustainable*) seperti pada pemanfaatan limbah atau sampah sebagai biogas dan energi lainnya.



Gambar 8. Sub-dimensi *Smart Environment*

Sumber: Citiasia inc.

BAB II

ARAH PEMBANGUNAN PASURUAN *SMART CITY*

2. 1. Visi, Misi dan Sasaran Pasuruan *Smart City*

2.1.1 Visi, Misi *Smart City* Kota Pasuruan

Visi *smart city* Kota Pasuruan disusun berdasarkan dokumen rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) Kota Pasuruan 2021-2026, Visi Pembangunan *smart city* Kota Pasuruan, adalah :

“MEWUJUDKAN KOTA PASURUAN YANG MAJU EKONOMINYA, INDAH KOTANYA, DAN HARMONI WARGANYA MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI TEPAT GUNA”.

Pasuruan yang maju ekonominya, menggambarkan mempercepat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal untuk membuka lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan sebagai arah pencapaian utama dari program *Smart city* Kota Pasuruan. Indah kotanya berarti membangun kota yang indah dan nyaman melalui konektivitas infrastruktur ekonomi dan Sosial berkelanjutan. Harmoni yang memantapkan kehidupan masyarakat multikultural yang harmonis dengan modal sosial yang tangguh serta jaminan akses pendidikan dan kesehatan yang merata. Melalui teknologi informasi tepat guna lebih kepada merefleksikan transformasi layanan publik yang mudah dan cepat melalui digitalisasi manajemen dan birokrasi yang adaptif.

Untuk mewujudkan visi kota Pasuruan tersebut diperlukan misi. Misi *Smart city* Kota Pasuruan sebagai berikut :

1. Terwujudnya ekonomi yang maju melalui industri kreatif dengan transaksi digital yang transparan
2. Terwujudnya kota yang indah dan nyaman dengan infrastruktur yang terintegrasi

3. Terwujudnya masyarakat multikultural yang harmonis dengan jaminan akses pendidikan dan kesehatan yang terpadu
4. Terwujudnya layanan publik yang mudah dan cepat melalui teknologi informasi tepat guna

2.1.2 Sasaran *Smart City*

Rumusan sasaran *smart city* di Kota Pasuruan menjabarkan target yang harus dicapai oleh Kota Pasuruan dalam melaksanakan program *smart city*, berikut ini adalah sasaran *smart city* dari Kota Pasuruan;

1. *Smart Governance*

Smart Governance dapat diartikan sebagai tata kelola yang pintar, dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah. *Smart Governance* di dalam domain *Smart city* merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan proses bisnis (*business process*) yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan. Secara umum terdapat 3 sasaran dari domain *smart governance* yakni;

1. Pelayanan Publik (*Public Service*):

Meningkatnya peran *governance* dalam kaitan layanan berbasis digital

2. Manajemen Birokrasi Yang Efisien (*Bureaucracy*):

Memerlukannya media sosial untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung.

3. Efisien Kebijakan Publik (*Public Policy*):

a. Menguatnya komitmen antara Diskominfo dengan seluruh OPD untuk mewujudkan implementasi satu pintu data terintegrasi

b. Meningkatnya kembali Forum CSR yang mendukung pembangunan Pemerintah Kota Pasuruan

Sasaran tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Kota Pasuruan. Untuk pelayanan publik, Kota Pasuruan harus mengoptimalkan peran *governance* dalam kaitan layanan berbasis digital. Diperlukan juga media sosial sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat dalam meningkatkan manajemen birokrasi yang efisien. Dalam peningkatan efisiensi kebijakan publik, pemerintah bekerjasama dengan Diskominfo dengan seluruh OPD untuk mewujudkan implementasi satu pintu data terintegrasi, serta mengaktifkan forum CSR yang mendukung pembangunan Pemerintah Kota Pasuruan.

2. *Smart Branding*

Domain *smart branding* merupakan istilah yang digunakan untuk meningkatkan daya saing daerah melalui penataan wajah kota

dan pemasaran potensi daerah, baik dalam lingkungan lokal, nasional maupun internasional. *Smart branding* adalah upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan produk suatu daerah dan meningkatkan daya saing daerah. Sasaran dari domain smart branding dari Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. *Branding* Pariwisata:

- a. Meningkatnya potensi wisata religi, heritage, pesisir, kampung tematik, agrowisata sebagai potensi pengembangan destinasi pariwisata Kota Pasuruan setelah masa pandemi
- b. Meningkatnya promosi wisata terpadu baik daerah maupun kawasan secara lebih gencar dan masif

2. *Branding* Investasi dan Usaha

- a. Meningkatnya perubahan pengurusan administrasi dan yang terpusat (satu pintu) berbasis online (OSS)
- b. Meningkatnya informasi yang akurat dan aktual tentang perubahan perumusan potensi dan peluang investasi di Kota Pasuruan

3. Citra Kota

- a. Meningkatnya revitalisasi tata kota yang modern dengan tetap memiliki keunikan lokal

Sasaran tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan yang ada pada dimensi *smart branding*. Pada *branding* pariwisata, harus mengoptimalkan seluruh potensi pengembangan destinasi pariwisata Kota pasuruan. *Branding* investasi dan usaha diperlukan perubahan pengurusan administrasi yang terpusat dan informasi yang akurat dan aktual. Merevitalisasi tata kota yang modern dengan tetap memperhatikan keunikal lokal juga diperlukan untuk meningkatkan citra kota.

3. *Smart Economy*

Domain *smart economy* menggaris bawahi yang berkaitan dengan tata kelola perekonomian. Domain ini lebih menitikberatkan perwujudan ekosistem perekonomian di daerah yang selaras dengan sektor unggulan daerah sehingga dapat memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat. Berikut ini adalah rumusan sasaran yang ada pada domain *smart economy* di Kota Pasuruan:

1. Ekosistem Industri

Meningkatnya pembangun ekosistem usaha yang terintegrasi dan berdaya saing terutama pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, meubel, kerajinan tangan, makanan dan minuman olahan

2. Kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya pemerataan dan pelatihan tenaga kerja

3. Ekosistem transaksi Keuangan

Meningkatnya ekosistem keuangan digital untuk kesejahteraan rakyat

Untuk memenuhi sasaran tersebut, diharapkan Pemerintah Kota Pasuruan dapat membangun ekosistem usaha yang terintegrasi dan berdaya saing di segala sektor. Kesejahteraan masyarakat dengan pemerataan dan pelatihan tenaga kerja. Serta membangun ekosistem keuangan digital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. *Smart Living*

Domain dari *smart living* menitikberatkan pada komponen mendukung kehidupan yang layak. Kualitas hidup dan juga komponen kebudayaan masyarakat merupakan komponen yang penting dalam mempengaruhi dalam *smart city* seperti tersedianya kebutuhan-kebutuhan akan rasa keamanan, keselamatan, kemudahan dan kenyamanan hidup. Sasaran *smart living* berdasarkan permasalahan dan kebutuhan yang ada di Kota Pasuruan:

1. Mewujudkan harmonisasi tata ruang wilayah

Meningkatnya lingkungan yang harmonis dengan mengintegrasikan antara pemukiman, pusat kegiatan bisnis, dan fasilitas rekreasi

2. Mewujudkan keterhubungan dan ketersediaan sarana transportasi

Meningkatnya ekosistem transportasi yang mudah dalam pemenuhan kebutuhan logistic suatu daerah

3. Mewujudkan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan

Meningkatnya penyediaan E-Rekam medis dan layanan *home care*

Untuk dapat menjawab tantangan yang ada pada dimensi smart living, dibutuhkan lingkungan yang harmonis dengan terintegrasi semua fasilitas yang ada, ekosistem transportasi yang mudah, dan peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan.

5. *Smart Society*

Pada domain *smart society* berfokus pada sosial masyarakat sebagai unsur sebuah kota. Manusia merupakan modal utama dari sosial masyarakat, maka dari itu sumber daya manusia perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga terwujud dalam individu dan komunitas-komunitas yang berdaya saing dan kreatif. Modal sosial masyarakat dapat memberikan akses internet yang lebih baik terutama di sekolah-sekolah pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Hal ini diterapkan dengan meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, dengan meningkatnya peran sosial masyarakat maka menguat pula keserasian masyarakat dengan lingkungan. Nilai yang tertanam seperti inilah yang perlu dipertahankan dalam pengembangan konsep *smart city*. Maka dari itu berikut ini adalah sasaran dari *smart society* Kota Pasuruan.

1. Mewujudkan komunitas fisik dan digital yang efisien

Meningkatnya pengembangan komunitas warga melalui edukasi kepada masyarakat

2. Mewujudkan ekosistem belajar yang efisien

Meningkatnya akses internet yang lebih baik terutama di sekolah-sekolah

3. Mewujudkan sistem keamanan masyarakat

Meningkatnya sistem manajemen keamanan dan keselamatan bagi masyarakat

Untuk memenuhi sasaran smart living itu diperlukan pengembangan komunitas masyarakat yang efisien dengan edukasi serta melakukan pelatihan pada masyarakat. Akses internet juga tidak kalah penting akan hal ini.

6. *Smart Environment*

Domain *smart environment* merupakan domain lingkungan yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat serta keindahan lingkungan. Faktor *Smart* lingkungan adalah faktor yang berada di sekitar manusia dan mempengaruhi aspek kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Usaha pelestarian lingkungan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dan perlunya keterlibatan semua pihak untuk mewujudkan lingkungan hidup yang nyaman. Sasaran dari domain *Smart Environment* adalah;

1. Mengembangkan pembangunan yang peduli pada aspek lingkungan

Meningkatnya konsep *green city*

2. Mengimplementasikan tata kota hunian yang nyaman bagi masyarakat

Meningkatnya integrasi seluruh fasilitas di Kota Pasuruan sehingga dapat memudahkan kelancaran perizinan

3. Mengembangkan tata kelola sampah dan limbah yang efektif dan efisien

Meningkatnya pengembangan tata kelola energi yang bertanggungjawab

Untuk menjawab tantangan yang ada pada dimensi smart environment antara lain mengembangkan konsep *green city*. Dalam pengimplementasian tata kota hunian yang nyaman bagi masyarakat juga harus diintegrasikan dengan seluruh fasilitas di Kota Pasuruan sehingga dapat memudahkan kelancaran perizinan. Mengembangkan tata kelola energi yang bertanggung jawab.

Tabel 1. Visi dan Misi Pembangunan Kota Pasuruan

<p>Visi: MEWUJUDKAN KOTA PASURUAN YANG MAJU EKONOMINYA, INDAH KOTANYA, DAN HARMONI WARGANYA MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI TEPAT GUNA</p>
<p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan ekonomi yang maju dengan percepatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal. 2. Mewujudkan kota yang indah dan nyaman melalui konektivitas infrastruktur ekonomi dan sosial berkelanjutan. 3. Mewujudkan masyarakat yang harmoni dengan memantapkan kehidupan masyarakat multikultural yang harmonis dengan modal sosial yang tangguh serta jaminan akses Pendidikan dan kesehatan yang merata. 4. Mewujudkan teknologi informasi tepat guna untuk merefleksikan transformasi layanan publik yang mudah dan cepat melalui digitalisasi manajemen yang adaptif.

DIMENSI	SUB DIMENSI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OPD TERKAIT
<i>SMART GOVERNANCE</i>	Pelayanan Publik (<i>Public Services</i>)	Meningkatnya pelayanan administrasi kepada masyarakat yang mudah dan nyaman	Nilai IKM	<ul style="list-style-type: none"> ● Setda ● Bapenda ● BPKAD ● BKD ● Kecamatan ● Diskominfo ● DPMPTSP ● Dipendukcapil ● Inspektorat
	Manajemen Birokrasi Yang Efisien (<i>Bureaucracy</i>)	Meningkatnya tata kelola birokrasi yang dinamis berbasis teknologi	Indeks profesionalisme aparatur	
	Efisien Kebijakan Publik (<i>Public Policy</i>)	Meningkatnya sistem informasi kebijakan pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat	Persentase kegiatan yang mengutamakan aspirasi positif	

		dengan mudah	dari masyarakat secara berkesinambungan	
--	--	--------------	---	--

DIMENSI	SUB DIMENSI	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OPD TERKAIT
<i>SMART BRANDING</i>	Branding Pariwisata	Meningkatnya pemasaran pariwisata dan pengembangan Sumber Daya Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan	<ul style="list-style-type: none"> • Disparpora • DPMPTSP • Dinas Perhubungan
	Branding Investasi dan Usaha	Meningkatnya peta potensi investasi Kota Pasuruan dan promosi serta kebijakan insentif di bidang penanaman modal	Persentase ekosistem investasi yang menarik, mudah dan efektif untuk investor swasta	
	Citra Kota	Meningkatnya daya tarik destinasi dengan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur daerah dengan mengikuti dinamika modernisasi	Kualitas tata ruang dan wilayah kota dengan nilai arsitektur daerah serta mengikuti dinamika modernisasi	
<i>SMART ECONOMY</i>	Kesejahteraan Masyarakat (<i>Welfare</i>)	Meningkatnya stabilitas harga barang kebutuhan pokok	Rata-rata persentase fluktuasi harga barang	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Tenaga Kerja • Dinas Koperasi dan Usaha Mikro • Disperindag

			kebutuhan pokok	<ul style="list-style-type: none"> • BPD • Dinas Pertanian dan katahanan pangan
	Ekosistem industri yang berdaya saing (<i>industry</i>)	Meningkatnya kemandirian dan daya saing ekonomi yang berbasis pemberdayaan ekonomi local	Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	
	Ekosistem Transaksi Keuangan (<i>Transaction</i>)	Meningkatnya ekosistem transaksi digital dengan mendorong industri <i>E-Commerce</i> serta peningkatan pelayanan pajak daerah berbasis <i>online</i>	Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	
SMART LIVING	Tata Ruang Wilayah (<i>Harmony</i>)	Meningkatnya lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan harmonis dengan mengkombinasikan lingkungan pemukiman, lingkungan pusat kegiatan bisnis yang didukung dengan fasilitas rekreasi	Persentase mobilitas masyarakat dari lingkungan pemukiman menuju pusat kegiatan bisnis maupun pusat rekreasi	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perhubungan • Dinas Kesehatan • RSUD • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	Prasarana Kesehatan (<i>Health</i>)	Meningkatnya ketersediaan akses terhadap pelayanan kesehatan, makan dan minuman yang sehat, dan sarana prasarana olahraga	Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat	

			diakses oleh penyedia layanan kesehatan	
	Ketersediaan Sarana Transportasi (<i>Mobility</i>)	Meningkatnya ketersediaan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas bagi masyarakat termasuk untuk turis lokal maupun internasional	Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung yang dapat diakses publik	
SMART SOCIETY	Interaksi Masyarakat Yang Efisien (<i>Community</i>)	Meningkatnya komunitas sosial melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia baik secara individu maupun sosial dengan memanfaatkan lingkungan digital	Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program untuk menjembatani kesenjangan digital	<ul style="list-style-type: none"> ● Perpustakaan & Kearsipan ● DP3AKB ● SatPolPP ● Dinas Pendidikan ● Dinas Sosial
	Ekosistem Belajar Yang Efisien (<i>Learning</i>)	Meningkatnya tata kelola Pendidikan yang inovatif, efektif, dan efisien	Jumlah computer, laptop, tablet atau perangkat pembelajaran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa	

	Sistem Keamanan Masyarakat (<i>Security</i>)	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Kualitas sistem manajemen keamanan dan keselamatan bagi masyarakat yang terintegrasi antar Lembaga keamanan publik dalam bentuk panggilan darurat	
SMART ENVIRONMENT	Program Proteksi Lingkungan (<i>Protection</i>)	Meningkatnya sistem tata kelola kota yang ramah lingkungan	Persentase bangunan yang dibangun atau diperbaharui dalam 5 tahun terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip bangunan hijau	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	Tata Kelola Sampah dan Limbah (<i>Waste</i>)	Meningkatnya sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga dan industri	Persentase pusat pembuangan limbah yang dilengkapi dengan telemetering	
	Tata Kelola Energi Yang Bertanggungjawab (<i>Energy</i>)	Meningkatnya pembangkit listrik tenaga surya berbasis <i>solar cell</i>	Persentase bangunan di kota dengan pengukur energi cerdas	

	Tata kelola kawasan ruang terbuka hijau yang komprehensif	Meningkatnya ruang terbuka hijau tematik	Persentase luasan ruang terbuka yang terbangun	
--	---	--	--	--

2. 2. Indikator Utama *Smart City* Kota Pasuruan

Indikator utama *smart city* daerah merupakan luaran yang diharapkan pada kegiatan gerakan menuju kota cerdas. Sebagai ciri-ciri indikator kota cerdas dapat juga dilihat dari :

1. Kelengkapan: indikator harus bisa mengukur dan menyeimbangkan semua aspek yang relevan untuk evaluasi kota cerdas.
2. Teknologi netral: tidak memihak pada satu teknologi, yang ada saat ini atau di masa yang akan datang.
3. Kesederhanaan: indikator dapat diungkapkan dan disajikan dengan cara yang jelas dan dapat dimengerti.
4. Validitas: indikator merupakan cerminan akurat dari fakta dan data yang dapat dikumpulkan dengan menggunakan teknik ilmiah.
5. Dapat diverifikasi: indikator dapat diverifikasi dan direproduksi. Metodologinya cukup ketat untuk memberikan kepastian pada tingkat implementasi kriteria.
6. Ketersediaan: kualitas data tersedia, atau layak untuk memulai proses pemantauan <https://s.id/scpasuruankotayang> aman dan andal yang akan membuatnya tersedia di masa depan.

SNI ISO 37122:2019 adalah sebuah standar yang dikeluarkan SNI untuk Perkotaan dan Masyarakat Berkelanjutan – Indikator Untuk Kota Cerdas. Standar ini menentukan dan menetapkan definisi dan metodologi untuk serangkaian indikator untuk kota cerdas. Mempercepat perbaikan pelayanan dan kualitas hidup merupakan bagian penting dalam definisi kota cerdas. Dokumen ISO 37120 juga dimaksudkan untuk memberikan satu set lengkap berbagai indikator untuk mengukur kemajuan ke arah kota pintar. Tabel 2 berikut merupakan Indikator Utama *Smart City* Daerah yang terdiri dari *smart governance*, *smart branding*, *smart economy*, *smart living*, *smart society*, dan *smart environment*.

Tabel 2. Indikator Utama *Smart City* Kota Pasuruan

Dimensi	Sub-Dimensi	Sasaran	Indikator	Rujukan Indikator (RPJMD/SNI 37122/SDGs/ITMP/Perpres 80-2019/ dll)
SMART GOVERNANCE	Kebijakan Publik (Policy)	Jumlah layanan KK KTP yang terintegrasi dengan KUA	Nilai SPBE	RPJMD
			Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari) [10.3]	SNI ISO 37122:2019
		Jumlah layanan adminduk di Mal Pelayanan	Nilai IKM	RPJMD
			Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari) [10.3]	SNI ISO 37122:2019
		Jumlah layanan akte kematian yang terintegrasi dengan Rumah Sakit	Nilai SPBE	RPJMD
			Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari) [10.3]	SNI ISO 37122:2019
		Jumlah layanan akte kematian yang terintegrasi dengan izin pemakaman	Nilai SPBE	RPJMD
			Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari) [10.3]	SNI ISO 37122:2019

		Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	Nilai SPBE	RPJMD
	Manajemen Birokrasi Yang Efisien (<i>Bureaucracy</i>)	Pembangunan aplikasi layanan kelurahan	Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring [10.2]	SNI ISO 37122:2019
		Pembangunan website Bakesbangpol Mantab		
		sistem aplikasi perencanaan yang terintegrasi dengan perangkat daerah (<i>Paperless</i>)		
		Aplikasi terpadu berbasis satu pintu		
		Fasilitas pelayanan publik dan tatalaksana	Prosentase PD yang tertib dalam penyusunan dokumen perencanaan	Fasilitas pelayanan publik dan tatalaksana
Efisien Kebijakan Publik (<i>Public Policy</i>)	Menggandeng/kerjasama dengan akademisi dalam penyusunan SOP yang efisien, akurat dan sederhana	Prosentase perangkat daerah yang mengimplementasikan kebijakan sesuai SOP	RPJMD	
<i>SMART BRANDING</i>	Branding Pariwisata	Pemasaran Pariwisata	Pembuatan Buku katalog pariwisata	RPJMD
		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Optimalnya pengembangan amenities, SDM, dan penggunaan media sosial	RPJMD
		Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Roadmap ekonomi kreatif Kota Pasuruan	RPJMD
			Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan [17b.2]	SNI ISO 37122:2019

	Branding Investasi dan Usaha	Fasilitas/ insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Kebijakan fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal yang ditetapkan	RPJMD
		Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Umum Penanaman Modal • Jumlah potensi dan peluang investasi Kota Pasuruan yang terpetakan • Jumlah potensi investasi yang tervisualisasikan 	RPJMD
		Promosi penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta temu usaha yang terfasilitasi • Pameran promosi investasi yang diikuti 	RPJMD
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu di Bidang Penanaman Modal	Jumlah Penanganan Pengaduan yang Masuk dan ditindaklanjuti	RPJMD
	Citra Kota	Peningkatan daya tarik destinasi wisata	Kualitas tata ruang dan tata wilayah kota dengan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah serta mengikuti perkembangan dinamika modernisasi berkelas internasional	RPJMD

SMART ECONOMY	Kesejahteraan Masyarakat (<i>Welfare</i>)	Pemantauan stabilitas harga barang kebutuhan pokok	Rata-rata persentase fluktuasi harga barang kebutuhan pokok	RPJMD	
		koordinasi tim pengendalian inflasi daerah (TPID)	Jumlah rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah	RPJMD	
	Ekosistem industri yang berdaya saing (<i>industry</i>)	Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan pencaker.	Persentase peserta pelatihan yang sudah mendapatkan pekerjaan.	RPJMD	
		Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Pembentukan kelompok pemberdayaan ekonomi (KRPL dan karangkitri)	RPJMD	
		Pemberdayaan IKM logam dan mebel	Persentase IKM berkembang	RPJMD	
			Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk [5.2]	SNI ISO 37122:2019	
	Ekosistem Transaksi Keuangan (<i>Transaction</i>)	Peningkatan sistem pelayanan pajak daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Persentase potensi pendapatan daerah yang dikelola. Rasio kepuasan wajib pajak daerah yang dilayani. 	RPJMD	
		Pengembangan jaringan pemasaran <i>online</i> .	Jumlah usaha mikro yang terhubung dengan jaringan pemasaran <i>online</i> .	SNI ISO 37122:2019	
	SMART LIVING	Tata Ruang Wilayah (<i>Harmony</i>)	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana rinci tata ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase mobilitas masyarakat dari lingkungan pemukiman	SNI ISO 37122:2019

		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh pemerintah kabupaten/Kota	<i>(residential)</i> menuju pusat kegiatan bisnis <i>(commercial)</i> maupun pusat rekreasi <i>(recreational)</i>	
		Program penataan sarana dan prasarana pendukung perkotaan		
		Program penataan bangunan dan lingkungannya		
		Pengembangan ruang terbuka hijau tematik	Persentase ruang terbuka hijau yang terbangun	
Prasarana Kesehatan <i>(Health)</i>	Sistem Informasi pencatatan dan pelaporan kasus covid-19 (aplikasi SILACAK)	Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	SNI ISO 37122:2019	
	DIGIS <i>(Digital Information System)</i> Puskesmas dan antrian Online BPJS			
	Layanan Jemput Bola Pemeriksaan Gratis <i>(Home Care Service)</i> dan Layanan Ambulan Gratis	Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk	SNI ISO 37122:2019	
	Layanan Perizinan tenaga			

		Kesehatan		
	Ketersediaan Sarana Transportasi (<i>Mobility</i>)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase jalan umum dan jalan berbayar yang dicakup oleh peringatan dan informasi lalu lintas daring langsung (<i>real-time</i>)	SNI ISO 37122:2019
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah pengguna transportasi ekonomi berbagi per 100.000 penduduk	SNI ISO 37122:2019
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase ruang parkir umum yang dilengkapi dengan sistem pembayaran elektronik	SNI ISO 37122:2019
		Program Penyediaan Layanan Angkutan Wisata Yang Terintegrasi	Persentase rute angkutan umum dengan konektivitas internet yang	SNI ISO 37122:2019

			disediakan kota dan/atau dikelola untuk komuter	
		Pembangunan Smart PJU	Persentase lampu lalu lintas yang cerdas	SNI ISO 37122:2019
SMART SOCIETY	Interaksi Masyarakat Yang Efisien (<i>Community</i>)	Pengendalian Penduduk	Jumlah keluarga yang terdaftar dalam program BKKBN	RPJMD
		Peningkatan Kualitas Keluarga	Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	
		Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	
		Peningkatan layanan kesejahteraan social		
	Ekosistem Belajar Yang Efisien (<i>Learning</i>)	Pengembangan minat baca masyarakat	Jumlah buku perpustakaan umum dan judul e-book per 100.000 penduduk [17.3]	SNI ISO 37122:2019
			Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif [17.4]	
			Persentase populasi kota dengan kecakapan profesional di lebih dari satu bahasa [6.1]	
			Jumlah tingkat pendidikan tinggi sains,	

			teknologi, teknik dan matematika (STEM) per 100.000 penduduk [6.3]		
		Tata kelola pendidikan yang inovatif, efektif dan efisien	Jumlah komputer, laptop, tablet atau perangkat pembelajaran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa [6.2]	SNI ISO 37122:2019	
	Sistem Keamanan Masyarakat (<i>Security</i>)	Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah	Kelengkapan arsip data	RPJMD	
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital [13.4]	SNI ISO 37122:2019	
		Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital [15.1]		SNI ISO 37122:2019
			Kualitas sistem manajemen keamanan dan keselamatan bagi masyarakat secara terpusat dan terintegrasi antar lembaga keamanan publik dalam bentuk panggilan daruratt (<i>emergency call</i>) 911		

			Persentase kasus pengaduan panggilan yang teratasi dengan cepat dan tepat	
		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital [15.1]	SNI ISO 37122:2019
			Kualitas sistem manajemen keamanan dan keselamatan bagi masyarakat secara terpusat dan terintegrasi antar lembaga keamanan publik dalam bentuk panggilan daruratt (<i>emergency call</i>) 911	
			Persentase kasus pengaduan panggilan yang teratasi dengan cepat dan tepat	
SMART ENVIRONMENT	Program Proteksi Lingkungan (<i>Protection</i>)	Pengembangan sistem tata kelola kota yang ramah lingkungan	Persentase bangunan yang dibangun atau diperbaharui dalam 5 tahun terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip bangunan hijau [8.1]	SNI ISO 37122:2019
	Tata Kelola Sampah dan Limbah (<i>Waste</i>)	Pengembangan sistem tata kelola sampah terintegrasi	Persentase pusat pembuangan limbah (kontainer) yang dilengkapi dengan	SNI ISO 37122:2019

			<i>telemetering</i> [16.1] Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga [16.2] Persentase jumlah total sampah di kota yang digunakan untuk menghasilkan energi [16.3] Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota [16.4] Persentase tempat sampah umum yang merupakan tempat sampah umum yang difungsikan dengan sensor [16.5] Persentase limbah listrik dan elektronik kota yang didaur ulang [16.6]	
	Tata Kelola Energi Yang Bertanggung-	Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya berbasis <i>solar cell</i>	Persentase listrik kota yang diproduksi menggunakan sistem produksi listrik	SNI ISO 37122:2019

	jawab (<i>Energy</i>)		desentralisasi [7.4] Persentase bangunan di kota dengan pengukur energi cerdas [7.9]	
--	-------------------------	--	---	--

BAB III
STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*
KOTA PASURUAN

Berdasarkan analisis masa depan, analisis kesiapan daerah, isu strategis pembangunan daerah, maka dihasilkan strategi pembangunan *smart city* dibawah ini :

3. 1 Strategi *Smart Governance*

Sesuai dengan tujuan dari elemen *smart governance*, untuk mewujudkan tata kelola kota yang cerdas dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai *enabler*-nya sehingga menghasilkan birokrasi yang mudah, efektif dan efisien. Untuk itu elemen berikut ini diperlukan dalam menunjang *smart governance* antara lain:

a. Manajemen Birokrasi yang Efisien

- 1) Membangun sistem informasi layanan administrasi publik berbasis NIK terpusat untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif.
- 2) Penataan kembali penempatan SDM aparatur sesuai kompetensi, utamanya yang bergerak bidang IT
- 3) Membangun respon cepat keluhan masyarakat sesuai dengan SOP
- 4) Pemerataan internet WIFI gratis pada setiap RT/ RW

b. Pelayanan Publik yang Tepat Sasaran

- 1) Meningkatkan tata kelola berbasis teknologi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu
- 2) Penguatan manajemen pemerintahan berbasis akuntabilitas, transparansi, kinerja dan pelayanan publik
- 3) Membangun layanan yang *faster, better, cheaper*, dengan pelayanan sehari pasti ditangani
- 4) Mengoptimalkan peran governance dalam kaitan layanan berbasis digital

c. Penguatan Kebijakan Publik

- 1) Mengintegrasikan kebijakan pemerintahan berbasis SOP, Pengambilan kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan.
- 2) Membangun database terpadu dan terintegrasi dan membangun sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah berdasarkan urusan pemerintahan yang ditangani

- 3) Memanfaatkan CSR dalam kapasitas bukan hanya dalam bidang infrastruktur, tapi lebih kepada pemberdayaan masyarakat utamanya dalam pengembangan kota menuju *smart city*
- 4) Menyusun regulasi yang kuat terkait pelaksanaan satu pintu data

3. 2 Strategi *Smart Branding*

a. Peningkatan Ekosistem Pariwisata (*Tourism Branding*)

- 1) Mengembangkan potensi destinasi pariwisata kota (DPK), Daya Tarik Wisata Kota (DTWK) dan Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK) Pasuruan
- 2) Mengembangkan Strategi Promosi Pariwisata Kota
- 3) Mengembangkan industri pariwisata kampung pasuruan jaman mbiyen
- 4) Membangun jalan, transportasi, hotel/motel/*bedding & breakfast* (B&B), restoran, yang mendukung kenyamanan wisatawan (*amenities*)
- 5) Membangun budaya yang ramah kepada pengunjung (*hospitality*) termasuk kemampuan berbahasa asing, menyediakan *tour-guide*
- 6) Penyusunan kajian tren pariwisata terbaru dan penyusunan SOP promosi pariwisata melalui media cetak dan sosial

b. Modernisasi Bisnis Daerah (*Business Branding*)

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
- 2) Penyusunan regulasi yang cukup responsif terhadap perkembangan iklim penanaman modal
- 3) Menjalin kerjasama dengan UMKM maupun dinas daerah lain yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan investasi kota Pasuruan
- 4) Pemetaan potensi Investasi Kota Pasuruan untuk meningkatkan daya tarik Investor

c. Pembangunan dan Pemasaran wajah kota (*City Appearance Branding*)

- 1) Mewujudkan Kawasan Wisata Religi sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kota
- 2) Mewujudkan kawasan wisata mangrove pada pesisir Kota Pasuruan
- 3) Memperindah gerbang masuk Kota Pasuruan yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional

- 4) Membangun batas wilayah (*edge*), membangun penanda sebuah lokasi yang penting, berkesan bagi pengunjung (*landmark*), menyediakan navigasi yang unik menuju kota (*signage*), struktur jalan yang teratur (*path*), dan titik simpul kota (*node*) seperti alun-alun, simpang

3.3 Strategi *Smart Economy*

a. Membangun ekonomi industri yang kreatif

- 1) Membangun daya saing industri daerah dengan industri primer pertanian, perikanan dan peternakan
- 2) Membangun daya saing industri daerah dengan industri sekunder pengolahan meubel
- 3) Membangun daya saing industri daerah dengan industri tersier pasar produk kota pasuruan
- 4) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja
- 5) Meningkatkan hubungan industrial yang kondusif
- 6) Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan bagi pencari kerja
- 7) Meningkatkan kompetensi SDM pelaku usaha
- 8) Meningkatkan kualitas dan standarisasi produk IKM
- 9) Pemberian fasilitas serifikasi SVLK (sertifikasi verifikasi legal kayu)

b. Mewujudkan kesejahteraan rakyat

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan mengembangkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan rumah tangga (*income*)
- 2) Membangun Bursa Kerja *Online* untuk peningkatan penyerapan angkatan kerja
- 3) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengadakan Pasar Murah menjelang hari besar keagamaan

c. Membangun ekosistem transaksi keuangan yang *modern* dan transparan

- 1) Pemasaran menggunakan digital marketing/*marketplace* untuk UMKM
- 2) Meningkatkan penggunaan *less cash* / *e-wallet* untuk menjamin kelancaran pembayaran
- 3) Mewujudkan masyarakat yang *bankable* dan memiliki akses terhadap permodalan

3. 4 Strategi *Smart Living*

a. Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (*Harmony*)

- 1) Menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang
- 2) Meningkatkan kualitas penataan ruang
- 3) Meningkatkan jumlah tanah di jalan lingkar utara dan selatan
- 4) Mewujudkan lingkungan pusat kegiatan bisnis (*commercial*) yang didukung dengan fasilitas rekreasi untuk keluarga (*recreational*)

b. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Kesehatan yang modern (*Health*)

- 1) Membangun akses pelayanan kesehatan dengan fasilitas pendaftaran *online* secara menyeluruh
- 2) Membangun pelayanan e-rekam medis dan meningkatkan pelayanan *home care*
- 3) Membangun akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat (*food*)
- 4) Membangun akses terhadap sarana dan prasarana olahraga (*sport*)
- 5) Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan
- 6) Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor untuk pelaksanaan program PIS-PK

c. Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (*Mobility*)

- 1) Mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem informasi *location intelligence*
- 2) Pengembangan transportasi umum & bus sekolah (*real-time tracking system* menggunakan GPS & *maps*)
- 3) Pembangunan dan pengoperasian kawasan pelabuhan logistik dan perikanan sebagai pelabuhan pengumpan untuk menunjang kawasan industri kota pasuruan
- 4) Peremajaan angkutan umum maupun sarana prasarana lainnya

3. 5 Strategi *Smart Society*

a. Mewujudkan Interaksi Masyarakat Yang Efisien

- 1) Meningkatkan pelayanan publik (internet gratis untuk masyarakat)
- 2) Meningkatkan layanan pembelajaran siswa di masa PPKM darurat
- 3) Meningkatkan layanan terhadap pendidikan masyarakat/PAUD
- 4) Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial dengan mengedukasi masyarakat dengan pengetahuan tentang

marketplace

- 5) Memanfaatkan forum masyarakat untuk pengembangan masyarakat
- 6) Melibatkan kelompok dan tokoh agama dalam perumusan kebijakan tertentu
- 7) Mendayagunakan siswa/siswi sekolah vokasi untuk turut serta melakukan kegiatan di wilayah Kota Pasuruan
- 8) Melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat luar Kota Pasuruan dan lokasinya di area yang memberikan peluang agar datang kembali

b. Membangun Ekosistem Pembelajaran yang Efisien

- 1) Memastikan seluruh sekolah siap belajar tatap muka
- 2) Memastikan seluruh siswa di kota pasuruan menerima pendidikan yang layak dengan membangun platform edukasi bagi masyarakat antara lain *smart school*, *smart campus*, *smart pesantren*, *smart training* program
- 3) Mengembangkan sistem *E-Book* dan *E-Learning* bagi siswa
- 4) Memodifikasi komunitas masyarakat di kota lain yang lebih dulu berkembang

c. Mewujudkan Keamanan Masyarakat

- 1) Pemasangan CCTV di beberapa titik penting di wilayah kota pasuruan (Ruang Publik: Alun-alun, Siaga bencana)
- 2) Pemanfaatan sumberdaya dan alat kelengkapan pemerintah maupun teknologi sensor digital atau *Internet of Thing* (IoT)
- 3) Memberikan edukasi tentang keamanan siber dan pemberantasan hoax

3. 6 Strategi *Smart Environment*

a. Membangun Sistem Proteksi Lingkungan

- 1) Peningkatan pembangunan rumah layak huni (RUSUNAWA)
- 2) Pembangunan sanitasi berskala komunal dan individu
- 3) Optimalisasi Pemanfaatan sumber daya air (SPAM Umbulan)
- 4) Membuat MoU yang lebih jelas dan paten dalam proses pelaksanaan kerjasama dengan lembaga Pendidikan dan vendor

b. Mewujudkan Sistem Pengolahan Sampah

- 1) Penggunaan gas methan (TPA Blandongan) sebagai pengganti bahan bakar fosil.
- 2) Pengawasan terhadap perusahaan terhadap limbah yang dihasilkan
- 3) Pemanfaatan hasil bank sampah sebagai pembayaran PBB

- 4) Pembangunan IPLT (pengolahan air limbah menjadi air bersih)
 - 5) Penggunaan air lindi sebagai energi listrik
 - 6) Pengolahan sampah dengan sistem RDF (*Refused Derived Fuel*)
- c. Meningkatkan Pemanfaatan dan Pengelolaan Energi Alternatif
- 1) Pemanfaatan sinar matahari sebagai panel surya yang dapat digunakan di lampu penerangan jalan
 - 2) Pemanfaatan limbah/sampah sebagai biogas
- d. Membangun tata kelola ruang terbuka hijau yang komprehensif
- 1) Menyusun potensi pembangunan RTH tematik yang sesuai RTRW
 - 2) Menyusun Masterplan kawasan ruang terbuka hijau tematik
 - 3) Penataan konsep RTH sebagai ruang publik yang nyaman

3. 7 Inovasi Program pada Dimensi *Smart City*

Agar pemerintah Kota Pasuruan dapat mewujudkan strategi dan program kegiatan yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu program/kegiatan yang baru yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Program/kegiatan ini merupakan Inovasi yang coba dilakukan pada setiap dimensi *Smart City*. Adapun semua inovasi yang dapat dilakukan selama 10 tahun kedepan kurun waktu 2022-2021 pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Inovasi pada dimensi *Smart City*

<i>Smart Governance</i>	
Sub-Dimensi	Inovasi yang dilakukan
Layanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi penerbikan KK KTP el status kawin dengan KUA melalui inovasi jalan berdua dengan ojek layanan publik 2. Integrasi penerbikan KK KTP el status cerai hidup dengan PA melalui inovasi pesta terakhir ojek layanan publik 3. Pelayanan adminduk di mall pelayanan public dengan program inovasi bilik layanan status hayati terpadu
Birokrasi yang efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan aplikasi si Upin (sistim pelayanan publik dan inovasi) 2. Pengembangan aplikasi sistem perencanaan, keuangan, dan pengawasan terpadu daerah (SIPENGUTANG DUDA)
<i>Smart Branding</i>	
Sub-Dimensi	Inovasi yang dilakukan
Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pemasaran pariwisata dengan inovasi Website khusus promosi pariwisata (membuat video pariwisata) 2. Program peningkatan daya Tarik destinasi wisata

	<p>dengan inovasi Eco Wisata (wisata edukasi), wisata religi, desa wisata</p> <p>3. Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif dengan inovasi pelatihan pemandu wisata</p>
Daya Saing Bisnis	1. Program pengembangan iklim penanaman modal dengan inovasi aplikasi SIAP BOS
Wajah Kota	<p>1. Program memperindah gerbang masuk kota dengan inovasi pembaharuan seluruh <i>billboard</i> elektronik</p> <p>2. Pelaksanaan event pariwisata dan festival budaya lokal</p>
<i>Smart Economy</i>	
Sub-Dimensi	Inovasi yang dilakukan
Ekosistem Industri	<p>1. Program peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan pencaker dengan inovasi pelatihan perencanaan sesuai kebutuhan pelaku usaha dan pencaker</p> <p>2. Inovasi digitalisasi manajemen koperasi dan pelaku usaha</p> <p>3. Meningkatkan <i>urban farming</i> yang mengadaptasi masyarakat milenial dengan cara <i>digital branding</i> untuk mencapai kemandirian pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan</p> <p>4. Manajemen pelatihan kompetensi Poklhasar yang berjenjang dan terukur</p> <p>5. Digitalisasi IKM, pelatihan mabel dan pengembangan industry kerajinan</p>
Kesejahteraan Masyarakat	<p>1. Inovasi Madinah Mart untuk kemudahan transaksi belanja pasar</p> <p>2. Pemerintah daerah beserta tim TPID memperluas Kerjasama dengan BUMD dan Swasta dalam program belanja online pasar rakyat</p> <p>3. Bekerjasama dengan perbankan dan Lembaga keuangan untuk mempermudah transaksi UPT pasar</p> <p>4. Melakukan kerjasama dengan ojek online dalam pengantaran barang yang efektif</p> <p>5. Peningkatan program <i>capacity bulding</i> pada anggota TPID dalam pengelolaan inflasi dan berpartisipasi aktif untuk menjaga pasokan bahan pokok dan menjaga kesinambungan program belanja online pasar rakyat</p>
Ekosistem Transaksi Keuangan	<p>1. Melaksanakan mobil pelayanan keliling (MOLING)</p> <p>2. Peningkatkan sistem pelayanan pajak daerah</p> <p>3. Jaringan pemasaran online (<i>IT Center</i> Pemasaran Produk Usaha Mikro)</p>

<i>Smart Living</i>	
Sub-Dimensi	Inovasi yang dilakukan
Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program ketataruangan terkait Perda, RTRW, dan RRTR dengan inovasi digitalisasi peta ketataruangan 2. Sistem informasi terintegrasi dengan menggunakan sistem OSS untuk pengurusan izin 3. Terintegrasi sistem peta dengan rencana pembangunan dari Bapeda
Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan DIGIS (Digital Information System) puskesmas termasuk antrian online BPJS untuk kemudahan pelayanan pasien BPJS 2. Pengembangan SIPNAKES (Pelayanan Perizinan Tenaga Kesehatan) 3. Layanan jemput bola, pemeriksaan gratis (Home Care Service), dan layanan ambulan gratis (e-PSC 119)
Ketersediaan Sarana Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan e-tilang 2. Penggunaan angkutan listrik yang ramah untuk angkutan wisata kota 3. Pembangunan parkir elektronik 4. Peningkatan layanan pengujian portable 5. Pembangunan layanan angkutan sekolah gratis berbasis digital 6. Pembembangan integrasi angkutan umum dengan Simpul Transportasi 7. Pembangunan kawasan Pelabuhan logistik dan perikanan
<i>Smart Society</i>	
Sub-Dimensi	Inovasi yang dilakukan
Interaksi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan dengan sistem digitalisasi berbentuk buku online 2. Aplikasi Sistem Informasi Keluarga Sejahtera (SIAGA) 3. Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan yang terintegrasi dengan data kependudukan DISPENSUKCAPIL 4. Aplikasi PERKASA (Perempuan Kepala Keluarga Sejahtera) 5. Literasi dengan aplikasi SIKSNG milik Kemensos RI (aplikasi cek bansos)
Ekosistem Belajar/ Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spot Suropati (LKS Online) 2. Melakukan Bimtek Dapodik dan sistem pelaporan yang disediakan Pusdatim Kemendikbud
Keamanan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi penyuluhan terkait peningkatan tugas serta peran Linmas

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menunjukkan intensitas Linmas dimasyarakat 3. Eksistensi Linmas dalam penanganan ketentraman dan ketertiban Linmas
Smart Environment	
Sub-Dimensi	Inovasi yang dilakukan
Proteksi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan tanaman langka dan endemik kota pasuruan untuk dilakukan konservasi 2. Bekerjasama dengan swasta untuk segera menuntaskan peningkatan rumah tidak layak menjadi rumah layak huni dalam program CSR 3. Pelaksanaan lomba kampung tematik yang bekerjasama dengan lingkungan hidup dalam hal kebersihan yang dimediasi oleh SDM dan media masa 4. Peningkatan kapasitas pelayanan, personil dan bekerjasama dengan akademisi dengan CSR, proteksi keamanan gedung disetiap fasilitas umum perkantoran dan sekolah-sekolah
Pengelolaan Sampah dan Limbah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan air lindi sebagai sumber listrik 2. Penggunaan metode anaerobik untuk pengelolaan IPAL agar dapat menghasilkan gas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi
Tata Kelola Energi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan <i>solar cell</i> di seluruh kota 2. Pemanfaatan gas metan sebagai bahan bakar 3. Pengelolaan sampah dengan metode RDF (Refuse Derrivate Fuel)

BAB IV

RENCANA AKSI *SMART CITY* KOTA PASURUAN

Rencana aksi *smart city* Daerah merupakan tindak lanjut dari program yang mendukung penerapan *masterplan smart city*. Pelaksanaan rencana aksi bertujuan untuk merealisasikan visi dan strategi *smart city* serta menjadi solusi atas masalah yang jelas dan tepat sasaran. Rencana aksi *smart city* masing-masing dimensi *smart city*, sebagai berikut :

4.1 Rencana Aksi *Smart Governance*

Rencana aksi *smart governance* memberikan gambaran tentang Layanan Publik, Manajemen Birokrasi yang Efisien, dan Efisiensi Kebijakan Publik.

a. Pengembangan kebijakan dan kelembagaan *smart city*.

1. Menyusun dokumen perjanjian kerjasama dan Penandatanganan MoU “Pelayanan Publik”
2. Menentukan jenis pelayanan di Mal Pelayanan Publik
3. Menyusun dokumen perjanjian kerjasama (Integrasi Penerbitan akta kematian dengan layanan rumah sakit)
4. Menyusun dokumen perjanjian kerjasama (Integrasi penerbitan Akta Kematian dengan layanan ijin pemakaman).
5. Menyusun dokumen perjanjian kerjasama (Pemanfaatan data kependudukan oleh OPD dalam rangka Membangun Portal Data Elektronik).
6. Membangun ekosistem dan tata kelola CSR yang baik dan transparan, baik regulasi maupun implementasinya
7. Kesepakatan dan Perjanjian Antar OPD dan Pihak Ketiga
8. Mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik
9. Mengadakan penilaian kinerja unit pelayanan publik Koordinasi dengan Bappeda, BPKA, Inspektorat
10. Koordinasi dengan Bagian Organisasi dalam rencana implementasi aplikasi
11. Komitmen antara akademisi dan PD

b. Pembangunan infrastruktur pendukung *smart city*.

1. Dokumen perjanjian kerjasama
2. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik
3. Dokumen perjanjian kerjasama
4. Koordinasi
5. Data unit pelayanan publik
6. Indikator terinput dalam aplikasi (Modul)
7. Pemetaan Dokumen Perencanaan Sebagai Basis Input Dalam

Aplikasi

8. Penyusunan SOP
 - c. Pengembangan aplikasi dan perangkat lunak pendukung *smart city*.
 1. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 2. Regulasi
 3. Aplikasi Pelayanan Publik
 4. Aplikasi Terpadu
 5. Aplikasi Terintegrasi Perencanaan
 - d. Penguatan Sumber Daya Manusia melalui literasi *smart city*.
 1. Sosialisasi Kerjasama
 2. Memperkuat jaringan dan pemanfaatan CSR
 3. Data kelurahan yang belum mendapatkan internet gratis
 4. Sosialisasi inovasi pelayanan publik
 5. Testing efisiensi implementasi aplikasi
 6. Implementasi aplikasi yang akan diintegrasikan dengan tunjangan pendapatan tambahan
 7. Implementasi SOP
- #### 4. 2 Rencana Aksi *Smart Branding*
- a. Pengembangan kebijakan dan kelembagaan *smart city*.
 1. Penyusunan database daya tarik wisata dengan *core tourism product* : religi/ziarah, budaya dan sejarah, dan industri kreatif
 2. Penyusunan RIPPAR Kota
 3. Penyusunan Perda Kepariwisata
 4. Penyusunan SK POKDARWIS
 5. Roadmap ekonomi kreatif Kota Pasuruan
 6. Penyusunan kajian, penyusunan amdal dan penyusunan amdalalin
 7. Perwali tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah Kabupaten/ Kota
 8. Perwali tentang penetapan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal
 9. Penyusunan RTRW (Dinas PUPR)
 10. Perwali tentang MPP
 11. MOU dengan instansi pelayanan publik
 12. Penyusunan standar pelayanan (SOP)
 13. Koordinasi dan kerjasama dengan kelurahan (untuk pelaksanaan kegiatan SIAP BOSS)

- b. Pembangunan infrastruktur pendukung *smart city*.
 1. Penggunaan media reklame untuk penyebaran informasi pariwisata tingkat lokal sampai internasional
 2. Pengoptimalan TIC (*Tourism Information Centre*) Pengoptimalan dan pengembangan amenitas pariwisata (tempat menginap, warung, pasar, dll)
 3. Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana (gedung) Kota Kreatif
 4. Pemenuhan infrastruktur vital di lokasi daya tarik wisata (jalan, saluran drainase, pedestrian, tempat sampah, PJU, dll)
 5. Pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur pada lokasi DTW
 6. Informasi digital mengenai peta potensi dan peluang investasi Kota Pasuruan yang dapat diakses oleh publik (khususnya investor)
 7. Penyediaan gedung Mall Pelayanan Publik (disperindag)
 8. Penyediaan Infrastruktur TI (diskominfo)
 9. Penyediaan Infrastruktur (sarana prasarana)
- c. Pengembangan aplikasi dan perangkat lunak pendukung *smart city*.
 1. Penguatan penggunaan Sosial media sebagai sarana promosi pariwisata
 2. Pengoptimalan digitalisasi produk-produk pariwisata
 3. Penguatan penggunaan Sosial media sebagai pengembangan kompetensi SDM
 4. Penguatan penggunaan Sosial media sebagai sarana pemasaran hasil industri ekraf Kota Pasuruan
 5. Penguatan penggunaan Sosial media sebagai sarana pemasaran potensi DTWK
- d. Penguatan Sumber Daya Manusia melalui literasi *smart city*.
 1. Pembuatan Buku katalog pariwisata
 2. Pelatihan SDM pelaku Pariwisata
 3. Pelatihan duta wisata
 4. Pelatihan SDM Ekraf
 5. Pengembangan Sistem Pemasaran (Lapakologi) hasil-hasil industri ekraf Kota Pasuruan
 6. Penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif
 7. Pembuatan dokumen *roadmap* ekraf
 8. Tercetaknya dokumen rencana induk pembangunan kepariwisataan kota pasuruan
 9. Tercetaknya dokumen penyusunan perencanaan kawasan strategis pariwisata kota

10. Penyusunan perencanaan destinasi pariwisata kota
11. Penyusunan peta potensi dan peluang investasi Kota Pasuruan
12. Penyusunan buku peluang investasi berupa dokumen proyek investasi yang clean and clear (*Investment Project Ready to Offer*)
13. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal Kegiatan Temu usaha dan fasilitasi kerjasama (*matchmaking*) penanaman modal
14. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah Kab/Kota (melalui pameran investasi dan forum bisnis)
15. Publikasi dan penyebarluasan informasi melalui website dan kanal media sosial
16. Pendampingan dan Audit ISO 9001:2015
17. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
18. Publikasi dan penyebarluasan informasi melalui media cetak maupun elektronik, website dan kanal media sosial
19. Kegiatan sosialisasi dan pelayanan bantuan bagi pelaku UMK dalam mengakses serta memperoleh izin usaha melalui sistem OSS (Inovasi SIAP BOSS; Serbuan Informasi dan Pelayanan Bantuan OSS)

4.3 Rencana Aksi *Smart Economy*

a. Pengembangan kebijakan dan kelembagaan *smart city*.

1. Kerjasama pelatihan kerja dengan BLK/ LPK.
2. Kerjasama dengan lembaga pelatihan dan perbankan
3. Pembentukan kelompok pemberdayaan ekonomi (KRPL dan karangkitri)
4. Pembentukan badan usaha/koperasi kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (Poklahsar)
5. MoU Pemerintah Kota Pasuruan dengan perusahaan PT.Panasonic
6. Perda Rencana Pembangunan Industri
7. Penyusunan dan Penerapan SK Tim Satgas *monitoring* harga kebutuhan pokok dan SK TPID
8. Penerapan Perda tentang pajak daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak
9. MOU/Kerjasama dengan pihak pemasaran *online* (*market place*)

b. Pembangunan infrastruktur pendukung *smart city*.

1. Pengadaan bahan-bahan pelatihan

2. Pembangunan lanjutan Gedung *workshop* (PLUT)
 3. Pembuatan greenhouse di pekarangan
 4. Demplot tanaman dalam bentuk *polybag* pada pekarangan
 5. Pembangunan sentra pemasaran produk perikanan
 6. Pengembangan gedung dan sarpras UPTD logam
 7. Pembangunan *Workshop*, kios kantor UPTD pasar mebel
 8. Pengadaan *running text* harga kebutuhan di setiap pasar
 9. *Upgrading* perangkat komputer
 10. Pengadaan perangkat komputer
- c. Pengembangan aplikasi dan perangkat lunak pendukung *smart city*.
1. Pemanfaatan Aplikasi pencaker.
 2. Pengembangan Aplikasi SIDUTA (pendataan pelaku usaha) dan pemanfaatan aplikasi pendataan koperasi (ODS) yang sudah ada.
 3. PH meter
 4. Alat ukur suhu
 5. Pembuatan aplikasi (digital *marketing* produk perikanan)
 6. *Software Coating* logam
 7. Pengadaan aplikasi Madinah *mart*
 8. Pengembangan aplikasi pendapatan daerah
 9. Pemanfaatan Aplikasi pemasaran *online*
- d. Penguatan Sumber Daya Manusia melalui literasi *smart city*.
1. Sosialisasi/informasi Bursa kerja
 2. Pendampingan kelompok untuk pengembangan hidroponik
 3. Pendampingan kelembagaan Poklamsar oleh penyuluh perikanan
 4. Sosialisasi aplikasi
 5. Sosialisasi melalui media cetak, elektronik
4. 4 Rencana Aksi *Smart Living*
- a. Pengembangan kebijakan dan kelembagaan *smart city*.
1. Perwali Pendukung
 2. SK Pendukung
 3. Data Kelengkapan kebutuhan
 4. Surat Ket Kerjasama / MoU Integrasi pada
 5. BPJS dan CAPIL
 6. Jejaring Puskesmas dan fasilitas Kesehatan Lainnya

7. Tenaga kesehatan
 8. Pembangunan Kawasan di Daerah Pesisir Kota
 9. Revitalisasi Kawasan Pemukiman Kumuh di Pesisir Kota Pasuruan menjadi kampung seni
 10. Pembangunan air mancur menari di Kawasan tugu alun alun Kota Pasuruan.
 11. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh pemerintah kabupaten/Kota
 12. Peningkatan Trotoar Ramah difabel
 13. Pembuatan Tempat Parkir *Underground* di Alun Alun Kota Pasuruan
 14. Penyusunan Kelembagaan dan kajian kawasan pelabuhan logistik dan perikanan sebagai pelabuhan pengumpan
- b. Pembangunan infrastruktur pendukung *smart city*.
1. Komputer, Laptop, Serta Perangkat pendukung
 2. Peralatan pensuport pelayanan antrian pelayanan Kesehatan
 3. Penguatan jaringan Internet
 4. Ambulan dan Alat-Alat Kesehatan
 5. SDM KesehatanPenguatan Jaringan Pendukung
 6. Komputer dan SDM Pengelola
 7. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Setempat
- c. Pengembangan aplikasi dan perangkat lunak pendukung *smart city*.
1. Aplikasi SILACAK,
 2. Aplikasi *New All Record-Antigen*
 3. *New All Record-PCR*,
 4. Aplikasi SILAPHAR
 5. Aplikasi BLC
 6. E-DIGIS PKM
 7. SIANPUS
 8. E-PSC 119
 9. SIPNAKES (SISTEM INFORMASI PERIJINAN TENAGA KESEHATAN)
 10. *Data Base Jalan*

d. Penguatan Sumber Daya Manusia melalui literasi *smart city*.

1. PSC 119 di Kota Kota Lain
2. Dokumen Perizinan
3. Sosialisasi melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), forum komunikasi kelompok sosial maupun jaringan informasi lain yang sudah ada
4. Membangun sinergi antara akademisi, bisnis, pemerintah, media dan komunitas melalui forum *Smart City*

4.5 Rencana Aksi *Smart Society*

a. Pengembangan kebijakan dan kelembagaan *smart city*.

1. Usaha Pengembangan SDM Berbasis IT bagi Aparatur
2. Peningkatan Kerjasama Komunitas Untuk Bersosialisasi
3. Peningkatan Koordinasi dengan Instansi Lain dan *Stake holder* perihal pengelolaan arsip sesuai standar nasional
4. Menurunkan jumlah penduduk
5. Menurunkan *Unmet Need* (kebutuhan KB yang belum terpenuhi)
6. Meningkatkan Usia Kawin Pertama Perempuan
7. Meningkatkan Partisipasi perempuan dalam dunia usaha
8. Meningkatkan keikutsertaan keluarga dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS)
9. Meningkatkan jumlah Masyarakat yang mendapatkan pelayanan sosial dari Mitra Kerja Sosial.
10. Kerjasama dalam pelayanan kesejahteraan sosial dengan mitra kerja sosial (PSM dan TKSK, TAGANA, Karang Taruna)
11. Meningkatkan angka partisipasi sekolah
12. Menurunkan angka putus sekolah
13. Meningkatkan jumlah peserta ujian paket a, b, c
14. Menurunkan pembiayaan yang bersifat bukan prioritas
15. Mendahulukan pembelian yang operasional dan prioritas
16. Mengintensifkan pelaksanaan pengawasan dan penindakan perda
17. Mengintensifkan pelaksanaan operasi penyakit masyarakat
18. Mengintensifkan pelaksanaan perlindungan masyarakat

b. Pembangunan infrastruktur pendukung *smart city*.

1. Penyediaan perlengkapan siswa (seragam) baik siswa di sekolah negeri maupun swasta
2. Fasilitas mobil Inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus
3. Pendataan sarpras sekolah yang rusak sedang/berat untuk diajukan perbaikan
4. Penyediaan pengadaan perlengkapan sekolah (Genset, laptop, dsb)
5. Membuat PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan Disdukcapil kota Pasuruan terkait database NIK kependudukan
6. SK Walikota ttg Tim Jejaring Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga
7. MoU dengan Dispendukcapil
8. MoU dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim
9. MoU dengan lembaga lembaga yang berhubungan dengan kearsipan
10. Jaringan Internet dengan pemeliharaan dan pengadaan server
11. Gedung, Kendaraan, Perlengkapan kantor (komputer dll), Sarpras perorangan/personel : Pakaian seragam, peralatan perorangan misal (HT, Rompi dll)

c. Pengembangan aplikasi dan perangkat lunak pendukung *smart city*.

1. Aplikasi SDM
2. Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)
3. Aplikasi sistem informasi kependudukan yang terintegrasi dengan data kependudukan Dispendukcapil
4. Aplikasi PERKASA (Perempuan Kepala Keluarga Sejahtera)
5. Aplikasi yang bisa diakses melalui *web / android*
6. SPOT suropati (lks *Online*)
7. Melakukan bimtek Dapodik
8. Melakukan bimtek Sistem pelaporan yang sudah disediakan oleh Pusdatin Kemdikbud
9. Menyediakan jaringan internet dan mendayagunakan website yang ada di UPT sekolah maupun di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan
10. E-Lapor (kominfo)
11. E-Sambat (kominfo)

- d. Penguatan Sumber Daya Manusia melalui literasi *smart city*.
 - 1. Literasi dengan aplikasi SIKS NextG milik Kemensos RI (aplikasi cek bansos)
 - 2. Sosialisasi penyuluhan terkait peningkatan tugas dan peran serta linmas
 - 3. Menunjukkan intensitas linmas di masyarakat
 - 4. Eksistensi linmas dalam penanganan ketentraman dan ketertiban linmas
 - 5. Peningkatan kapasitas satgas linmas dan satlinmas
 - 6. Pendidikan dan pelatihan linmas

4. 6 Rencana Aksi *Smart Environment*

- a. Pengembangan kebijakan dan kelembagaan *smart city*.
 - 1. Perwali tentang taman
 - 2. Perwali tentang Pengendalian Kota Kumuh
 - 3. Perwali tentang Pedoman Petunjuk Teknis Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
 - 4. Perwali tentang kelurahan tangguh bencana
 - 5. Perwali tentang sampah
 - 6. Perwali *solar cell*
- b. Pembangunan infrastruktur pendukung *smart city*.
 - 1. Pembangunan Permukiman tematik di 1 lokasi pembangunan IPLT penataan tata kelola makam
 - 2. Kelurahan se-kota Pasuruan
- c. Pengembangan aplikasi dan perangkat lunak pendukung *smart city*.
 - 1. E-makam
 - 2. E-perumahan
 - 3. E-permukiman
 - 4. Pendataan atau updating data Rumah Tidak Layak Huni
- d. Penguatan Sumber Daya Manusia melalui literasi *smart city*.
 - 1. Penyuluhan tentang pengelolaan lingkungan kepada masyarakat
 - 2. Kerja sama dengan kelompok swadaya masyarakat (KSM).
 - 3. Sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat

4. Survei, Sosialisasi dan pelaksanaan Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni
5. Pembentukan kelurahan tangguh bencana
6. Sosialisasi masyarakat tangguh bencana
7. Sekolah tanpa bencana
8. Bimbingan teknis kepada kelompok masyarakat tentang pengelolaan sampah
9. Bimtek tentang *solar cell*

Tabel 4. Rencana Aksi *Smart Governance*

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Layanan Publik	Peningkatan aksesibilitas, kemudahan dan kesederhanaan, serta kepastian pelayanan publik digital berbasis ketunggalan identitas Optimalisasi kerjasama (CSR) dalam membangun jaringan internet gratis	1. Integrasi penerbitan KK KTP-el status kawin dengan KUA melalui inovasi JALAN BERDUA dengan Ojek Layanan Publik.	Menyusun dokumen perjanjian kerjasama dan Penandatanganan MoU “Pelayanan Publik”	2022	Dokumen perjanjian kerjasama	2022	Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	2022 - 2023	Sosialisasi Kerjasama	2023
		2. Pelayanan Adminduk di Mall Pelayanan Publik.	Menentukan jenis pelayanan di Mal Pelayanan Publik	2022	Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan public	2022	Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	2022 - 2026	Sosialisasi	2022-2026
		3. Integrasi Penerbitan akta kematian dengan layanan	Menyusun dokumen perjanjian kerjasama	2022-2026	Dokumen perjanjian kerjasama	2022 - 2026	Aplikasi Sistem Informasi Administrasi	2023 - 2026	Sosialisasi Kerjasama	2023-2026

		rumah sakit.					Kependudukan			
		4. Integrasi penerbitan Akta Kematian dengan layanan izin pemakaman.	Menyusun dokumen perjanjian kerjasama	2023-2026	Dokumen perjanjian kerjasama	2023 - 2026	Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	2022 - 2026	Sosialisasi Kerjasama	2022-2026
		5. Pemanfaatan data kependudukan oleh OPD dalam rangka Membangun Portal Data Elektronik.	Menyusun dokumen perjanjian kerjasama	2022-2026	Dokumen perjanjian kerjasama	2022 - 2026	Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan		Sosialisasi Kerjasama	
		2. CSR dan kerjasama	Memperbaharui dan memperkuat regulasi terkait CSR	2022	Koordinasi	2022	Regulasi	2022	- Memperkuat jaringan dan pemanfaatan CSR -Data keluraha	2022

									n yang belum mendapatkan internet gratis	
Manajemen Birokrasi yang Efisien	Meningkatnya sistem tata kelola pemerintahan yang baik dalam menjamin pelayanan prima	1. Fasilitasi Kerjasama	Kesepakatan dan Perjanjian Antar OPD dan Pihak Ketiga	2022 – 2026	Data Kerjasama	2022 – 2026	-	-	Sosialisasi Kerjasama	2022 – 2026
		2. Fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	1. Mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik 2. Mengadakan penilaian kinerja unit pelayanan publik	2022 – 2026	Data unit pelayanan publik	2022 – 2026	Aplikasi Pelayanan Publik	-	Sosialisasi inovasi pelayanan public	2022 – 2026
		3. Membangun aplikasi terpadu (perencanaan, keuangan dan pengawasan)	Koordinasi dengan Bappeda, BPKA, Inspektorat	2022	Indikator terinput dalam aplikasi	2022	Aplikasi Terpadu	2023	Testing efisiensi implementasi aplikasi	2023

		berbasis satu pintu data 4. Membangun sistem aplikasi perencanaan yang terintegrasi dengan perangkat daerah (<i>Paperless</i>)	Koordinasi dengan Bagian Organisasi dalam rencana implementasi aplikasi	2022	Pemetaan Dokumen Perencanaan Sebagai Basis Input Dalam Aplikasi	2022	Aplikasi Terintegrasi Perencanaan	2023	Implementasi Aplikasi Yang akan diintegrasikan dengan tunjangan pendapatan tambahan	
Efisiensi Kebijakan Publik	Meningkatkan kualitas SOP masing-masing perangkat daerah	Menggandeng/kerjasama dengan akademisi dalam penyusunan SOP yang efisien, akurat dan sederhana	Komitmen antara akademisi dan PD	2022	Penyusunan SOP	2022	Komitmen tertulis	2023	Implementasi SOP	2023

Tabel 5. Rencana Aksi *Smart Branding*

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Pariwisata	<p>1.Mengembangkan potensi destinasi pariwisata kota (DPK), Daya Tarik Wisata Kota (DTWK) dan Kawasan Strategis Pariwisata Kota (KSPK) Pasuruan</p> <p>2.Mengembangkan Strategi Promosi Pariwisata Kota</p> <p>3.Mengembangkan Industri Pariwisata Kota</p>	<p>1. Program Pemasaran Pariwisata Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</p>	<p>1. Penyusunan data base daya tarik wisata dengan <i>core tourism product</i> : religi/ziarah, budaya dan sejarah, dan industri kreatif</p> <p>2. Penyusunan RIPPAR Kota</p> <p>3. Penyusunan Perda Kepariwisata an</p>	2022 , 2024	1. Penguatan media reklame untuk penyebaran informasi pariwisata tingkat lokal sampai internasional	2022 , 2024	<p>1. Penguatan pengguna an Sosial media sebagai sarana promosi pariwisata</p> <p>2. Penguatan digitalisasi produk-produk pariwisata</p>	2022 , 2024	1. Penguatan Buku katalog pariwisata	2023

					<i>Information Centre</i>)					
		2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1. Penyusunan SK POKDARWIS	2021, 2022, 2023	1. Penguatan dan pengembangan amenities pariwisata (tempat menginap, warung, pasar, dll)	2021, 2022, 2023	1. Penguatan penggunaan Sosial media sebagai pengembangan kompetensi SDM	2021, 2022, 2023	1. Pelatihan SDM pelaku Pariwisata 2. Pelatihan duta wisata 3. Pelatihan SDM Ekraf	2023
		3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan	1. Roadmap ekonomi kreatif Kota Pasuruan	2022, 2023	1. Pengembangan dan Revitalisasi Prasar	2021, 2022, 2023	1. Penguatan penggunaan Sosial media sebagai sarana	2023	1. Pengembangan Sistem Pemasaran	2023

		<p>Hak Kekayaan Intelektual</p> <p>a. Penyediaan Prasarana (Zona/Kota Kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kab/kota</p> <p>b. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif)</p>			ana (gedung) Kota Kreatif		pemasaran hasil industri ekraf Kota Pasuruan		<p>(Lapa kologi) hasil-hasil industri ekraf Kota Pasuruan</p> <p>2. Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif</p> <p>3. Pembuatan dokumen <i>roadmap</i> ekraf</p>	
Daya Saing Bisnis	Penyusunan regulasi yang cukup responsif	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Perwali tentang Rencana	2022					1. Penyusunan	2022-2026

	<p>bagi pengembangan iklim penanaman modal dan Peningkatan realisasi investasi</p>		<p>Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>2. Perwali tentang penetapan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal</p> <p>3. Penyusunan RTRW (Dinas PUPR)</p>	<p>2022</p> <p>2022</p>					<p>peta potensi dan peluang investasi Kota Pasuruan</p> <p>2. Penyusunan buku peluang investasi berupa dokumen proyek investasi yang <i>clean and clear</i></p>	<p>2022-2026</p> <p>2022-2026</p>
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	---	-----------------------------------

									(Investment Project Ready to Offer) 3. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal	
	Peningkatan realisasi investasi	Promosi Penanaman Modal			Informasi digital mengenai peta potensi	2026 - 2031			1. Kegiatan Temu usaha	2022-2026

					dan peluang investasi Kota Pasuruan yang dapat diakses oleh publik (khususnya investor)				dan fasilitasi kerja sama (<i>matching</i>) penanaman modal	
								2. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah Kab/Kota (melalui	2022-2026	

									<p>pameran investasi dan forum bisnis)</p> <p>3. Publikasi dan penyebaran informasi melalui <i>website</i> dan kanal media sosial</p>	2022-2026
	Meningkatnya kualitas pelayanan		1. Perwali tentang MPP	2022 - 2023	1. Penyediaan gedung	2022	Pengembangan aplikasi untuk	2022	1. Pendaan	2022-2026 2022-

	<p>penanaman modal dan perizinan</p>		<p>2. MOU dengan instansi pelayanan publik 3. Penyusunan standar pelayanan (SOP) 4. Koordinasi dan kerjasama dengan kelurahan (untuk pelaksanaan kegiatan SIAP BOSS)</p>	<p>2022 - 2023 2022 - 2031 2022 - 2031</p>	<p>Mall Pelayanan Publik (disperindag) 2. Penyediaan Infrastruktur TI (diskominfo) 3. Penyediaan Infrastruktur (sarana prasarana)</p>	<p>2022 2022</p>	<p>sistem antrian (diskominfo) Pengembangan sistem informasi data perizinan</p>	<p>2022 - 2026</p>	<p>dan Audit ISO 9001: 2015 2. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pendaan Masyarakat 3. Publikasi dan penyebarluasan informasi melalui media cetak maupun</p>	<p>2026 2022-2026 2022-2026</p>
--	--------------------------------------	--	--	--	---	-----------------------	--	--------------------	--	---

									<p>un elektr onik, <i>websi</i> <i>te</i> dan kanal media social</p> <p>4. Kegiat an sosiali sasi dan pelaya nan bantu an bagi pelak u UMK dalam meng akses serta memp eroleh izin usaha melal ui</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									<p>sistem OSS (Inovasi SIAP BOSS ; Serbuan Informasi dan Pelayanan Bantuan OSS)</p>	
Wajah/Citra Kota	<p>1. Mewujudkan Kawasan Wisata Religi sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Kota 2. Mewujudkan kawasan wisata mangrove pada pesisir</p>	<p>1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota b. Pengelolaan Kawasan Strategis</p>	<p>2. Penyusunan kajian, penyusunan AMDAL dan penyusunan amdalalin</p>	2023	<p>1. Peningkatan infrastruktur vital di lokasi daya tarik wisata (jalan, saluran draina</p>	2023	<p>Penguatan penggunaan Sosial media sebagai sarana pemasaran potensi DTWK</p>	2023	<p>1. Tercetaknya Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata</p>	2023

	<p>Kota Pasuruan</p> <p>3. Meningkatkan minat pengunjung Kota Pasuruan</p> <p>4. Memperindah gerbang masuk Kota Pasuruan</p>	<p>Pariwisata Kabupaten/ Kota</p>			<p>se, pedestrian, tempat sampah, PJU, dll)</p> <p>2. Pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur pada lokasi DTW</p>				<p>Kota Pasuruan</p> <p>2. Tercetaknya Dokumen Penyusunan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota</p> <p>3. Penyusunan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kota</p>	
--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>n Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.</p> <p>a. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan</p> <p>b. Pemberdayaan IKM logam dan mebel</p>	<p>aan ekonomi (KRPL dan karakitri)</p> <p>b. Pembentukan badan usaha/koperasi kelompok pengolahan dan pemasar hasil perikanan (Poklahsar)</p> <p>c. MoU Pemerintah Kota Pasuruan dengan perusahaan PT Panasonic</p> <p>d. Perda</p>	<p>2021-2026</p>	<p>pekerangan</p> <p>b. Demplot tanaman dalam bentuk polybag pada pekerangan</p> <p>Pembangunan sentra pemasaran produk perikanan</p> <p>Pengembangan gedung dan sarpras UPTD logam</p> <p>Pembangu</p>	<p>2022 - 2026</p> <p>2022 - 2026</p> <p>2022 - 2026</p>	<p>a. PH meter</p> <p>b. Alat ukur suhu</p> <p>c. Pemanfaatan aplikasi (digital marketing produk perikanan)</p> <p><i>Software</i></p>	<p>2022 - 2026</p> <p>2022 - 2026</p>	<p>pok untuk pengembangan hidropnik</p> <p>c. Pemandangan kelembagaan Poklahsar oleh penyuluhan perikanan</p>	<p>2022-2026</p> <p>2022-2026</p>
--	--	--	--	------------------	---	--	--	---------------------------------------	---	-----------------------------------

			Rencana Pembangunan Industri		nan <i>Workshop</i> , kios kantor UPTD pasar mebel		<i>Coating</i> logam			
Kesejahteraan Masyarakat	Menjaga stabilitas harga pangan dan non pangan yang berdampak pada peningkatan nilai konsumsi Masyarakat	1. Pemantauan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok. a. monitoring harga kebutuhan bahan pokok b. koordinasi tim pengendalian inflasi daerah (TPID)	Penyusunan dan Penerapan SK Tim Satgas monitoring harga kebutuhan pokok dan SK TPID	2022-2026	Pengadaan running text harga kebutuhan di setiap pasar	2022 - 2026	Pengadaan aplikasi <i>Madinah mart</i>	2022 - 2026	Sosialisasi aplikasi	2022-2026
Ekosistem Transaksi Keuangan	Penguatan inovasi pelayanan pajak,	1. Pengembangan Sistem dan peningkatan pelayanan	Penerapan Perda tentang pajak daerah dengan	2022-2026	Upgrading perangkat komputer	2022 - 2026	Pengembangan aplikasi pendapatan daerah	2022 - 2026	Sosialisasi melalui media cetak,	2022-2026

gan (Perbaikan & Digitalisasi Ekonomi)	retribusi dan jaringan pemasaran UMKM keseluruhan masyarakat berbasis digitalisasi	pajak daerah. a. Pelayanan mobil keliling. b. Pengembangan sistem pelayanan pajak daerah. c. Pembangunan sistem pendapatan daerah.	memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak						elektronik	
		2. Pengembangan jaringan pemasaran <i>online</i> . pelatihan pemasaran secara <i>online</i> bagi pelaku usaha	MOU/Kerjasama dengan pihak pemasaran <i>online</i> (<i>market place</i>)	2022-2026	Pengadaan perangkat komputer	2022 - 2026	Pemanfaatan Aplikasi pemasaran <i>online</i>	202-2026	Sosialisasi aplikasi	202-2026

Tabel 7. Rencana Aksi *Smart Living*

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Harmonisasi Tata Ruang	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Kota Yang aktivitas Perekonomian Masyarakat.	Revitalisasi Kawasan Pantai dan Pesisir Kota	Pembangunan Kawasan di Daerah Pesisir Kota	2022-2026	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang 2. Masyarakat Sekitar 3. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Setempat	2022-2026	kampanye melalui publikasi media massa offline dan online, serta media sosial	2022-2026	Sosialisasi melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), forum komunikasi kelompok sosial maupun jaringan informasi lain yang sudah ada	2022-2026
		Revitalisasi Kawasan	Revitalisasi Kawasan	2022-2026	1. Dinas Pekerjaan	2022-	kampanye melalui	2022-	Sosialisasi	2022-2026

		Kumuh Pesisir Kota Menjadi Kampung Seni	Pemukiman Kumuh di Pesisir Kota Pasuruan menjadi kampung seni.		<ul style="list-style-type: none"> 1. Dinas Penataan ruang 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 3. Masyarakat Sekitar 4. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Setempat 	2026	publikasi media massa <i>offline</i> dan <i>online</i> , serta media sosial	2026	melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), forum komunikasi kelompok sosial maupun jaringan informasi lain yang sudah ada	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Alun Alun Kota	Pembangunan Kawasan air mancur menari di tugu alun alun Kota Pasuruan.	2022-2026	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang 2. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan 	2022 - 2026	kampanye melalui publikasi media massa <i>offline</i> dan <i>online</i> , serta media sosial	2022 - 2026	Memban- gun sinergi antara akademi si, bisnis, pemerintah, media dan	2022-2026

					an dan Pertama nan				komunit as melalui forum <i>Smart City</i>	
		Koordinasi dan Singkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh pemerintah kabupaten/Kot a	Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Tanah Bagi Msayarakat	2022- 2026	1. Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataa n ruang 2. Dinas Lingkun gan Hidup, Kebersih an dan Pertama nan 3. Dinas Pariwisa ta Pemuda dan Olahrag a (Dinas Pengam pu)	2022 - 2026	-	2022 - 2026	Sosialisa si melalui Kelompo k Informas i Masyara kat (KIM), forum komunik asi kelompo k sosial	2022- 2026
		Peningkatan sarana dan	Peningkatan Trotoar	2022- 2026	1. Dinas Pekerjaa	2022 -	1. Database	2022 -	Sosialisa si	2022- 2026

		prasarana Jalan dan Trotoar Kota	Ramah difabel di kota		n Umum dan Penataan ruang	2026	Jalan	2026	melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), forum komunikasi kelompok sosial maupun jaringan informasi lain yang sudah ada	
		Revitalisasi Sarana dan Prasarana penunjang Kota	Pembuatan Tempat Parkir Underground di Alun Alun Kota Pasuruan	2022-2026	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang 2. Dinas Lingkungan Hidup,	2022 - 2026	-	2021 - 2026	Memban gun sinergi antara akademi si, bisnis, pemerintah melalui forum	2022-2026

					Kebersihan dan Pertamanan				<i>Smart City</i>	
Kesehatan	1) Optimisasi tata laksana pelayanan kesehatan masyarakat	1. Sistem Informasi pencatatan dan pelaporan kasus covid-19 (aplikasi SILACAK)	1. Perwali Pendukung 2. SK Pendukung 3. Data Kelengkapan kebutuhan	2022	Komputer, Laptop, Serta Perangkat pendukung	2022	1. Aplikasi SILACAK, 2. aplikasi New All Record-Antige 3. New All Record-PCR, 4. Aplikasi SILAPHAR, 5. Aplikasi BLC	2021	PSC 119 di Kota Kota Lain	
	2) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan sumber daya	2. DIGIS (Digital Information System) Puskesmas termasuk antrian Online BPJS untuk kemudahan pelayanan pasien BPJS	1. Perwali Pendukung 2. SK Pendukung 3. Surat Ket Kerjasama / MoU Integrasi pada BPJS dan CAPIL	2021	1. Peralatan pendukung pelayanan antrian pelayanan Kesehatan	2022	1. E-DIGIS PKM 2. SIANPUS	2021		

	Kesehatan				2. Penguatan jaringan Internet					
	3) Penguatan upaya promotif dan preventif melalui peningkatan peran serta masyarakat	3. Layanan Jemput Bola Pemeriksaan Gratis (Home Care Service) dan Layanan Ambulan Gratis 4. Layanan Perijinan tenaga Kesehatan	Jejaring Puskesmas dan fasilitas Kesehatan Lainnya Tenaga kesehatan	2021 2021	- Ambulan dan Alat-Alat Kesehatan - SDM Kesehatan - Penguatan Jaringan Pendukung Komputer dan SDM Pengelola	2021 2021	E-PSC119 SIPNAKES (Sistem Informasi Perijinan Tenaga Kesehatan)	2022 2018	 Dokumen Perijinan	
Transportasi	Meningkatnya keselamatan dan kelancaran kondisi lalu	PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Perda Pendukung 2. SK Pendukung 3. Surat Kerjasama	2021-2026	Infrastruktur sarana dan prasarana serta sumber daya manusia	2021 - 2026	Si Tilang (<i>E Tilang</i>) Si Pantas Si Uji Si Angkot Si Laut <i>Smart</i> PJU	2021 - 2026	Dokumen MoU Peraturan Pendukung	

	<p>lintas yang aman, nyaman dan tersedia nya angkutan umum yang layak dan berkesinambungan</p>		<p>/ MoU</p> <p>4. Optimalisasi sistem pemantauan dan himbauan lalu lintas berbasis digital</p> <p>5. Optimalisasi sistem pengujian berbasis digital</p> <p>6. Optimalisasi Angkutan berbasis Digital</p> <p>7. Kerjasama Pembangunan Kepelabuhanan (MoU)</p> <p>8. Infrastruktur</p>		<p>yang kompeten</p>					
--	--	--	---	--	----------------------	--	--	--	--	--

			Berbasis Digital							
--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 8. Rencana Aksi *Smart Society*

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Interaksi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Layanan 2. <i>Event Lomba Antar Sekolah dan Umum</i> 3. Peminjaman <i>Online</i> dengan Mitra Kerja (<i>Star Up</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Program Pengembangan Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan 3. Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah 4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Pengembangan SDM Berbasis IT bagi Aparatur 2. Peningkatan Kerjasama Komunitas Untuk Bersosialisasi 3. Peningkatan Koordinasi dengan Instansi Lain dan <i>Stake holder</i> perihal pengelolaan 	<p>2022, 2024, 2026</p> <p>2021 - 2026</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan Internet dengan pemeliharaan dan pengadaan <i>server</i> 2. MoU dengan lembaga lembaga yang berhubungan dengan kearsipan 	<p>2021 - 2026</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Software</i> SDM 	<p>2021 - 2026</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan literasi dengan sistem digitalisasi berbentuk buku <i>online</i> 	

			arsip sesuai standar nasional							
1. Melaksanakan Advokasi, sosialisasi, konseling kepada masyarakat tentang Program KB	Program Pengendalian Penduduk	1. Menurunkan jumlah penduduk 2. Menurunkan <i>Unmet Need</i> (kebutuhan KB yang belum terpenuhi) 3. Meningkatkan Usia Kawin Pertama Perempuan	2021-2026	1. MoU dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim 2. MoU dengan Dispendukcapil	2021 - 2026	1. Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga) 2. Aplikasi sistem informasi kependudukan yang terintegrasi dengan data kependudukan	2021 - 2026	1. Peningkatan sistem informasi kependudukan yang terintegrasi dengan data kependudukan	2021-2026	
2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1. Meningkatkan Partisipasi perempuan dalam dunia usaha		2. SK Walikota ttg Tim Jejaring Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga		2. Aplikasi sistem informasi kependudukan yang terintegrasi dengan data kependudukan		2. Pendaampingan dan Bantuan Modal Usaha		
3. Mewujudkan Pembe	Program Pemberdayaan dan	1. Meningkatkan				3. Aplikasi PERKA				

	rdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	keikutsertaan keluarga dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS) 2. Meningkatkan jumlah Masyarakat yang mendapat pelayanan dari Mitra Kerja				SA (Perempuan Kepala Keluarga Sejahtera)		untuk Perempuan Kepala Keluarga 3. Pemberdayaan Perempuan Berbasis Dasawisma dan PKK	
4. Meningkatkan layanan PPKS	Perlindungan dan Jaminan Sosial (<i>Updating</i> data PPKS)	Peningkatan Kerjasama dalam pelayanan kesejahteraan sosial dengan OPD terkait dan mitra kerja sosial (PSM	2021-2026	1. Jaringan internet dan server 2. Membuat PKS (Perjanjian Kerja Sama)	2021-2026	Aplikasi yang bisa diakses melalui <i>web / android</i>	2021-2026	Literasi dengan aplikasi SIKS NG milik Kemensos RI (aplikasi cek bansos)	2021-2026	

			dan TKSK, TAGANA, Karang Taruna)		dengan Disdukcapil kota Pasuruan terkait database NIK kependudukan					
Ekosistem Belajar/ Pendidikan	Meningkatkannya Taraf Pendidikan Masyarakat Terpenuhinya fasilitas dan kenyamanan belajar/mengajar	1. Program pengelolaan pendidikan	1. Meningkatkan angka Partisipasi sekolah 2. Menurunkan angka putus sekolah 3. Meningkatkan jumlah peserta ujian paket A, B, C	4. ...	1. Pemetaan siswa ABK (anak berkebutuhan Khusus) 2. Pelan inklusi kepada siswa ABK 3. Pendataan sarpras sekolah yang rusak sedang/ berat untuk diajukan	2022 - 2026	1. SPOT suropati (Sistem Pembelajaran Online Terpadu) 2. melakukan bimtek Dapodik 3. melakukan bimtek Sistem pelaporan yang sudah	2021 - 2026	Assesment nasional untuk siswa dan guru yang berbasis dengan literasi, numerasi, dan karakter	

					perbaikan 4. Penyediaan pengadaan perlengkapan sekolah (Genset, laptop, dsb)		disediakan oleh Pusdatin Kemdikbud			
			1. Menurunkan pembiayaan yang bersifat bukan prioritas 2. Mendahulukan pembelian yang operasional dan prioritas		1. Penyediaan perlengkapan siswa (seragam) baik siswa di sekolah negeri maupun swasta		1. Menyediakan jaringan internet dan mendayagunakan website yang ada di UPT sekolah maupun di Dinas Pendidikan			

							dan Kebuda- yaan Kota Pasuru- an			
Keam- anan Masy- araka- t	- Pening- katan Kapasi- tas dan Integri- tas Penega- kan Peratu- ran Daera- h - Pening- katan Penerti- ban Penyak- it Masya- rakat - Pening- katan	1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Mengintensif- kan pelaksanaan pengawasan dan penindakan perda 2. mengintensif- kan pelaksanaan operasi penyakit masyarakat 3. mengintensif- kan pelaksanaan perlindungan masyarakat	2021	Gedung, Kendaraan, Perlengkap- an kantor (komputer dll), Sarpras perorangan /personel : Pakaian seragam, peralatan perorangan misal (HT, Rompi dll)		1. E- Lapor (kominf- o) 2. E- Sambat (kominf- o)		1. Sosiali- sasi Penyul- uhan terkait pening- katan tugas dan peran serta linmas 2. Menun- jukkan intensi- tas linmas di masya- rakat 3. Eksite	Satpol pp

	Kapasi tas Perlind ungan Masya rakat								nsi linmas dalam penang anan ketentr aman dan keterti ban linmas	
		a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/K ota b. Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/K ota dan Peraturan Bupati/Walik ota							1. Pemb inaan pening katan kapasit as satgas linmas dan satlin mas 2. Pendid ikan dan pelatih an linmas	

Tabel 9. Rencana Aksi *Smart Environment*

Sub-Dimensi	Strategi	Program/Kegiatan	Rencana Aksi/Tahun							
			Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Proteksi Lingkungan (Tana h, Air, Udara)		a. Pengelolaan keanekaragaman hayati	1. Perwali tentang taman	2020	1. Lahan, sarana dan prasarana,	2021	<i>E-makam e-perumahan e-permukiman</i>	2024	1. Penyuluhan tentang pengelolaan lingkungan kepada masyarakat	2021
		b. Program Kota Tanpa Kumuh	2. Perwali tentang Pengendalian Kota Kumuh	2018	2. Pembangunan Permukiman tematik di 1 lokasi	2022		2021	2. Kerja sama dengan kelompok swadaya masyarakat (KSM). sosialisasi/penyuluh	2021
		c. Penuntasan Program Rumah Layak Huni	3. Perwali tentang Pedoman Petunjuk Teknis Bantuan Rumah Tidak Layak Huni		3. pembangunan IPLT penataan tata kelola makam	2021		2021		
					4. Tersedianya sumber	2021		Pendataan atau updating data Rumah Tidak Layak		

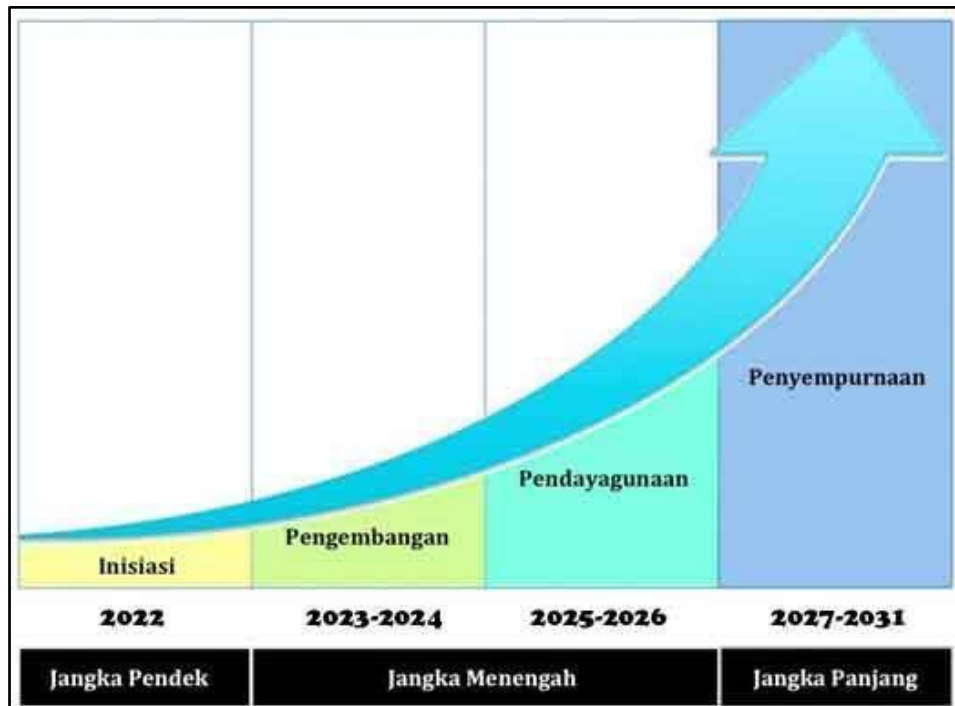
					dana baik pusat maupun daerah		Huni		an kepada masyarakat 3. Survei, Sosialisasi dan pelaksanaan Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni	
		2.Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanganan bencana	1.Perwali tentang kelurahan tangguh bencana	2021	1. Kelurahan se Kota Pasuruan	2022		2024	1.Pembentukan kelurahan tangguh bencana 2. Sosialisasi masyarakat	2024

									tangg h bencan a 3. Sekola h tanpa bencan a	
Penge lolaan Samp ah & Limba h		1. Pengelolaan sampah 2, Program pengelolaan dan pengembang an sistem air limbah	1.Perwali tentang sampah	2021	1.Sarana Prasarana	2022		2024	1.Bimbi ngan teknis kepada kelomp ok masyar akat tentan g pengel olaan sampa h	
Tata Kelola Energi		Pemanfaatan sinar matahari sebagai <i>solar cell</i>	Perwali <i>solar cell</i>	2021	1. Sarana dan Prasara na	2022		2024	1.Bimtek tentan g <i>solar cell</i>	

BAB 5

PETA JALAN PEMBANGUNAN *SMART CITY* KOTA PASURUAN

Penyusunan masterplan *smart city* disesuaikan dengan tahapan pembangunan *smart city* yang dilakukan berdasarkan fase kematangan *smart city* yaitu fase inisiasi, fase pengembangan, fase pendayagunaan, dan fase penyempurnaan seperti yang ditunjukkan pada gambar 9 berikut ini.



Gambar 9. Roadmap Pembangunan Smart City Kota Pasuruan

Pada gambar 9 diatas memberikan gambaran tentang: fase inisiasi merupakan fase dimana suatu daerah baru mulai membangun kesiapan *smart city*. Fase pengembangan merupakan fase peningkatan aspek-aspek pendukung *smart city* (aplikasi, infrastruktur, literasi, kelembagaan). Fase pendayagunaan menggambarkan bahwa suatu daerah telah menjalankan program *smart city* dengan baik. Tahap penyempurnaan merupakan tahap untuk menyempurnakan dan optimalisasi program *smart city*. Berikut ini merupakan rangkuman dari peta jalan pembangunan *Smart City* Kota Pasuruan.

5.1 Peta Jalan *Smart Governance*

Tabel 10. Roadmap Pembangunan Smart Governance 2022-2031

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
<i>SMART GOVERNANCE</i>	Integrasi penerbitan KK KTP-el status kawin dengan KUA melalui inovasi JALAN BERDUA dengan Ojek Layanan Publik.	Menyusun dokumen perjanjian kerjasama dan Penandatanganan MoU “Pelayanan Publik”	Pengembangan Aplikasi Sistem Administrasi Kependudukan	Terwujudnya integrasi dan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD/Lembaga	Terwujudnya integrasi dan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD/Lembaga
	Integrasi penerbitan KK KTP-el status cerai ⁴³ hidup dengan PA melalui inovasi PESTA TERAHIR dengan Ojek Layanan Publik.	Menyusun dokumen perjanjian kerjasama dan Penandatanganan MoU “Pelayanan Publik”	Pengembangan Aplikasi Sistem Administrasi Kependudukan	Terwujudnya integrasi dan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD/Lembaga	Terwujudnya integrasi dan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD/Lembaga

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
	Pelayanan Adminduk di Mall Pelayanan Publik.	Menentukan jenis pelayanan di Mal Pelayanan Publik	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Terwujudnya integrasi dan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD/Lembaga	Terwujudnya integrasi dan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD/Lembaga
	Integrasi penerbitan akta kematian dengan layanan rumah sakit.		Penyusunan dokumen perjanjian kerjasama	Sosialisasi Kerjasama	Terwujudnya integrasi dan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD/Lembaga
	Integrasi penerbitan Akta Kematian dengan layanan izin pemakaman.	Penyusunan dokumen perjanjian kerjasama	Penyusunan dokumen perjanjian kerjasama	Sosialisasi Kerjasama	Terwujudnya integrasi dan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD/Lembaga

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
	Pemanfaatan data kependudukan oleh OPD dalam rangka Membangun Portal Data Elektronik.			Terwujudnya integrasi dan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD/Lembaga	Terwujudnya integrasi dan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD/Lembaga
	CSR dan Kerjasama	Memperbaharui dan memperkuat regulasi terkait CSR	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat jaringan dan pemanfaatan CSR Data kelurahan yang belum mendapatkan internet gratis 	Meningkatkan peran serta stakeholder/mitra pemerintahan dalam pembangunan daerah berkelanjutan terkait pemenuhan sarana prasarana internet gratis bagi masyarakat	Meningkatkan peran serta stakeholder/mitra pemerintahan dalam pembangunan daerah berkelanjutan terkait pemenuhan sarana prasarana internet gratis bagi masyarakat

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
	Membangun aplikasi layanan kelurahan	Penyusunan dokumen perjanjian kerjasama	Pengembangan aplikasi layanan kelurahan	Penyebarluasan dan sosialisasi penggunaan aplikasi layanan kelurahan	
	Membangun website Bakesbangpol Mantab (Menjaga stabilitas wilayah)	Persiapan pembangunan <i>website</i>	Peluncuran dan sosialisasi masyarakat, partai, Ormas/LSM	Tercapainya 10 informasi konten stabilitas wilayah	Tercapainya 10 informasi konten stabilitas wilayah
	Fasilitasi Kerjasama	Kesepakatan dan Perjanjian Antar OPD dan Pihak Ketiga	Sosialisasi Kerjasama	Data Kerjasama tersedia	
	Fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	<ol style="list-style-type: none"> Mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik Mengadakan penilaian kinerja unit pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> Mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik Mengadakan penilaian kinerja unit pelayanan publik 	Terciptanya inovasi pelayanan publik	Terciptanya inovasi pelayanan publik

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pengembangan aplikasi analisis jabatan	Pengembangan aplikasi analisis jabatan	Peningkatan persentase jumlah perangkat daerah yang memiliki analisis jabatan	Peningkatan persentase jumlah perangkat daerah yang memiliki analisis jabatan
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Pengintegrasian sistem aplikasi dengan SAKIP	Pengintegrasian sistem aplikasi dengan SAKIP	Tercapainya integrasi data kinerja dalam aplikasi SIJAJA (Sistem Informasi Jabatan dan Kinerja) dengan SAKIP	Tercapainya integrasi data kinerja dalam aplikasi SIJAJA (Sistem Informasi Jabatan dan Kinerja) dengan SAKIP
	Membangun aplikasi terpadu (perencanaan, keuangan dan pengawasan) berbasis satu pintu data	Koordinasi dengan Bappeda, BPKA, Inspektorat	Aplikasi Terpadu	Testing efisiensi implementasi aplikasi	Peningkatan prosentase keselarasan antara perencanaan, keuangan dan pengawasan

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
	Membangun sistem aplikasi perencanaan yang terintegrasi dengan perangkat daerah (<i>Paperless</i>)	Koordinasi dengan Bagian Organisasi dalam rencana implementasi aplikasi	Aplikasi Terintegrasi Perencanaan	Peningkatan prosentase PD yang tertib dalam penyusunan dokumen perencanaan	Peningkatan kualitas dan efektifitas perencanaan terintegrasi dengan sistem capaian kinerja pegawai berbasis IT
	Menggandeng/kerjasama dengan akademisi dalam penyusunan SOP yang efisien, akurat dan sederhana	Komitmen antara akademisi dan PD dan penyusunan SOP	Komitmen tertulis	Implementasi SOP	Peningkatan Prosentase perangkat daerah yang mengimplementasikan kebijakan sesuai SOP
	Pengembangan Aplikasi Kepegawaian (SIMASKOT)	Aplikasi kepegawaian	Pengembangan aplikasi	Meningkatkan updating data kepegawaian dan pelayanan di bidang kepegawaian	Seluruh data kepegawaian sudah Valid dan layanan di bidang kepegawaian yang tepat waktu dan

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
					tepat sasaran
	Pengembangan kompetensi ASN	Kerjasama dengan pihak ketiga dan BPSDM	Pengembangan kompetensi ASN	Indeks profesionalitas ASN yang meningkat	Indeks profesionalitas ASN yang meningkat

5.2 Peta Jalan *Smart Branding*

Tabel 11. Roadmap Pembangunan Smart Branding 2022-2031

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
<i>SMART BRANDING</i>	Program aplikasi informatika	Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik	Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik	Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik	Peningkatan Aplikasi yang terintegrasi

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penyusunan peta potensi dan peluang investasi Kota Pasuruan	Penyusunan buku peluang investasi berupa dokumen proyek investasi yang clean and clear (<i>Investment Project Ready to Offer</i>)	
	Promosi Penanaman Modal	Kegiatan Temu usaha dan fasilitasi kerjasama (<i>matchmaking</i>) penanaman modal	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah Kab/Kota (melalui pameran investasi dan forum bisnis)	Publikasi dan penyebaran informasi melalui website dan kanal media sosial	Informasi digital mengenai peta potensi dan peluang investasi Kota Pasuruan yang dapat diakses oleh publik (khususnya investor)
	Program Pelayanan Penanaman Modal (dengan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan gedung Mall Pelayanan Publik (disperindag) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem informasi data perizinan • Pengembangan 	Kegiatan sosialisasi dan pelayanan bantuan bagi pelaku UMKM	Peningkatan Aplikasi yang terintegrasi

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
	Penyediaan Pelayanan Terpadu satu atap)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Infrastruktur TI (diskominfo) • Penyediaan Infrastruktur (sarana prasarana) • Kegiatan sosialisasi dan pelayanan bantuan bagi pelaku UMKM dalam mengakses serta memperoleh izin usaha melalui sistem OSS (Inovasi SIAP BOSS; Serbuan Informasi dan Pelayanan Bantuan OSS) 	<p>aplikasi untuk sistem antrian (diskominfo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan sosialisasi dan pelayanan bantuan bagi pelaku UMKM dalam mengakses serta memperoleh izin usaha melalui sistem OSS (Inovasi SIAP BOSS; Serbuan Informasi dan Pelayanan Bantuan OSS) 	dalam mengakses serta memperoleh izin usaha melalui sistem OSS (Inovasi SIAP BOSS; Serbuan Informasi dan Pelayanan Bantuan OSS)	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan data base daya tarik wisata dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan media reklame untuk penyebaran 	Meningkatnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota	

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
	Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	core tourism product : religi/ziarah, budaya dan sejarah, dan industri kreatif <ul style="list-style-type: none"> ● Penyusunan RIPPAN Kota ● Penyusunan Perda Kepariwisataa n 	informasi pariwisata tingkat lokal sampai internasional <ul style="list-style-type: none"> ● Pengoptimalan TIC (<i>Tourism Information Centre</i>) ● Penguatan penggunaan Sosial media sebagai sarana promosi pariwisata ● Pengoptimalan digitalisasi produk-produk pariwisata ● Pembuatan Buku katalog pariwisata 	Pasuruan	

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Penyusunan SK POKDARWIS	<ul style="list-style-type: none"> • Pengoptimalan dan pengembangan amenitas pariwisata (tempat menginap, warung, pasar, dll) • Penguatan penggunaan Sosial media sebagai pengembangan kompetensi SDM • Pelatihan SDM pelaku Pariwisata • Pelatihan duta wisata • Pelatihan SDM Ekraf 	Meningkatnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Pasuruan	

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	<ul style="list-style-type: none"> Roadmap ekonomi kreatif Kota Pasuruan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Pembuatan dokumen <i>roadmap</i> ekraf 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana (gedung) Kota Kreatif Penguatan penggunaan Sosial media sebagai sarana pemasaran hasil industri ekraf Kota Pasuruan Pengembangan Sistem Pemasaran (Lapakologi) hasil-hasil industri ekraf Kota Pasuruan 	Meningkatnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Pasuruan	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan kajian, penyusunan amdal dan penyusunan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan infrastruktur vital di lokasi daya tarik wisata (jalan, 	<ul style="list-style-type: none"> Tercetaknya Dokumen Rencana Induk Pembangunan 	Meningkatnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
		<p>amdalalin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kota 	<p>saluran drainase, pedestrian, tempat sampah, PJU, dll)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur pada lokasi DTW • Penguatan penggunaan Sosial media sebagai sarana pemasaran potensi DTWK 	<p>n</p> <p>Kepariwisata Kota Pasuruan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tercetaknya Dokumen Penyusunan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota 	Pasuruan
	Penetapan pemberian fasilitas/ insentif di bidang Penanaman Modal yang	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan data perkembangan investasi • Pembuatan kebijakan 	Pengembangan data penanaman modal di Kota Pasuruan	Kenaikan penanaman modal di Kota Pasuruan	Kenaikan penanaman modal di Kota Pasuruan

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
	menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal yang ditetapkan			

5.3 Peta Jalan *Smart Economy*

Tabel 12. Roadmap Pembangunan Smart Economy 2022-2031

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
<i>SMART ECONOMY</i>	1.Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan pencaker				
	a. pelatihan ketrampilan	Kerjasama pelatihan kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan bahan-bahan 	Meningkatnya persentase peserta	

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
	kerja bagi pencaker.	dengan BLK/ LPK	pelatihan <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan lanjutan Gedung <i>workshop</i> (PLUT) • Pemanfaatan Aplikasi pencaker. • Pengembangan Aplikasi siduta (pendataan pelaku usaha) dan pemanfaatan aplikasi pendataan koperasi. 	pelatihan yang sudah mendapatkan pekerjaan	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
	b. pelatihan keterampilan manajemen koperasi dan pelaku usaha.	Kerjasama dengan lembaga pelatihan dan perbankan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan bahan-bahan pelatihan • Pembangunan lanjutan Gedung <i>workshop</i> (PLUT) 	Jumlah usaha mikro yang naik kelas ke usaha kecil	Meningkatnya produktivitas usaha mikro

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
			<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan Aplikasi pencaker. • Pengembangan Aplikasi siduta (pendataan pelaku usaha) dan pemanfaatan aplikasi pendataan koperasi 		
	c. pelatihan teknis, industri dan pengolahan.		<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan bahan – bahan pelatihan • Pembangunan lanjutan Gedung <i>workshop</i> (PLUT) • Pemanfaatan Aplikasi pencaker. • Pengembangan Aplikasi 	Meningkatnya persentase pertumbuhan IKM	Meningkatnya persentase pertumbuhan IKM

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
			siduta (pendataan pelaku usaha) dan pemanfaatan aplikasi pendataan koperasi.		
	2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat				
	a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaraga man Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembentukan kelompok pemberdayaan ekonomi (KRPL dan karakitri) ● Demplot tanaman dalam bentuk polybag pada pekarangan ● Pembuatan <i>greenhouse</i> di pekarangan 	Pendampingan kelompok untuk pengembangan hidroponik	Pengembangan pendampingan kelompok untuk pengembangan hidroponik	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat dan menambah pendapatan melalui hasil produksi tanaman sayur

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
	b. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan badan usaha/koperasi kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (Poklahsar) Pembuatan aplikasi (digital marketing produk perikanan) 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sentra pemasaran produk perikanan Pengembangan aplikasi produk perikanan 	Pendampingan kelembagaan Poklahsar oleh penyuluh perikanan	Meningkatnya produk olahan perikanan
	c. Pemberdayaan IKM logam dan mebel	<ul style="list-style-type: none"> MOU Pemerintah Kota Pasuruan dengan perusahaan PT Panasonic Perda Rencana Pembangunan Industri 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan gedung dan sarpras UPTD logam <i>Software Coating</i> logam Pembangunan <i>Workshop</i>, kios kantor UPTD pasar mebel 	Pengembangan <i>software</i> dan sarpras UPTD logam	Meningkatnya volume hasil produksi logam dan mebel

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
	3. Pemantauan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok.				
	a. <i>Monitoring</i> harga kebutuhan bahan pokok.	Penyusunan dan Penerapan SK Tim Satgas <i>monitoring</i> harga kebutuhan pokok	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan <i>running text</i> harga kebutuhan di setiap pasar • Pengembangan pasar tradisional berbasis on line melalui aplikasi Madinah <i>mart</i> • Sosialisasi aplikasi madinah market place dan madinah mart • Pemasaran produk2 IKM melalui aplikasi 	Terwujudnya kestabilan harga bahan pokok	Terwujudnya kestabilan harga bahan pokok

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
			Madinah Market Place		
	b. Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	Penyusunan dan Penerapan SK TPID	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengadaan <i>running text</i> harga kebutuhan di setiap pasar ● Pengadaan aplikasi Madinah <i>mart</i> ● Sosialisasi aplikasi 	Terwujudnya pengendalian inflasi daerah	Terwujudnya pengendalian inflasi daerah
	Pengembangan Sistem dan peningkatan pelayanan pajak daerah.	<ul style="list-style-type: none"> ● Penerapan Perda tentang pajak daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak ● <i>Upgrading</i> perangkat komputer ● Pelayanan mobil 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengembangan aplikasi pendapatan daerah ● Pengadaan dan pengembangan sarpras mobil keliling ● Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik 	Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan kepuasan wajib pajak ● Meningkatkan PAD

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
		keliling <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sistem pendapatan daerah 			
	Pengembangan jaringan pemasaran <i>online</i>	<ul style="list-style-type: none"> • MoU/Kerjasama dengan pihak pemasaran <i>online</i> (<i>market place</i>) • Pengadaan perangkat komputer • Pengembangan jaringan pemasaran online 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan pemasaran secara <i>online</i> bagi pelaku usaha • Pemanfaatan Aplikasi pemasaran <i>online</i> • Sosialisasi aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan Aplikasi pemasaran <i>online</i> • Sosialisasi aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan omzet UMKM • Meningkatkan rata-rata kenaikan omzet UMKM pertahun

5.4 Peta Jalan *Smart Living*

Tabel 13. Roadmap Pembangunan *Smart Living*

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
<i>SMART LIVING</i>	Program penyelenggaraan penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi tata ruang • Dokumen rencana tata ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pemanfaatan sistem informasi tata ruang • Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota • Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi Kawasan Pemukiman Pesisir Kota Pasuruan dari Kawasan Kumuh Menjadi kawasan kampung seni • Revitalisasi Kawasan Kota Tua Menjadi ikon Kota Pasuruan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Pemukiman penduduk Pesisir yang Terevitalisasi • Bangunan di Kota Tua yang dipelihara serta Meningkatkan Nilai Estetika pada bangunan yang ada

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana rinci tata ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penyusunan rencana Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Peraturan daerah terkait rencana RTRW dan RTTR 	<ul style="list-style-type: none"> Sinkronisasi rencana tata ruang 	
	Program penataan sarana dan prasarana pendukung perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> Revitalisasi Kawasan Alun Alun Ramah Difabel Sarana dan Prasarana Ramah difabel di alun alun yang ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Tempat Parkir <i>Underground</i> di depan masjid Jami al anwar alun alun Kota Optimalisasi Trotoar di Wilayah Kota Pasuruan Dalam Kondisi 50% 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi Trotoar di Wilayah Kota Pasuruan Dalam Kondisi 65% 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi Trotoar di Wilayah Kota Pasuruan Dalam Kondisi 85%

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Penyusunan rencana pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan <i>Food Center</i> di samping alun alun guna memperkenalkan wisata kuliner di Kota Pasuruan • Pembangunan Air Mancur Menari di tengah tengah Alun Alun guna memperkenalkan tugu Kota Pasuruan kepada wisatawan 		
	Peningkatan sarana dan prasarana publik yang ramah lingkungan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pesepedah di Kota Pasuruan	kampanye melalui publikasi media massa <i>offline</i> dan <i>online</i> , serta media sosial	Prosentase Sarana dan Prasarana Pesepeda di Kota yang ditingkatkan	Prosentase Sarana dan Prasarana Pesepeda di Kota yang ditingkatkan
	Program penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk 	Jumlah penyelesaian masalah meningkat sehingga mengindikasikan perbaikan		

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
	pembangunan	pembangunagn oleh pemerintah daerah kabupaten/kota			
	Program retribusi tanah, serta ganti kerugian, program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Penetapan subjek dan objek retribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (Satu) daerah kabupaten/kota	Presentase penetapan subjek dan objek retribusi daerah meningkat		
	Program Penunjang urusan pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi tata laksana penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat • Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kenaikan persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu 		

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
		Daerah			
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota • Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana prasarana puskesmas yang baik • Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi 		

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
		Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota			
	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kota • Kegiatan pembinaan dan Pengembangan SDM Bidang Kesehatan 	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Pelatihan secara berkala	Pelatihan secara berkala
	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan 		

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
			Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan dan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan <i>Post Market</i> Pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 		
	Program pembedayaan masyarakat bidang kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan rumah tangga sehat • Jumlah kebijakan terkait Germas 	

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
		Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 	(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> • 	yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah di 5 kluster (kebijakan)	

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
	Sistem Informasi pencatatan dan pelaporan kasus covid-19 (aplikasi SILACAK)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Perwali pendukung • SK pendukung • Data kelengkapan 	Pengembangan aplikasi SILACAK, <i>New All Record-antigen</i> , <i>New All Record-PCR</i> , SILAPHAR, dan aplikasi BLC	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi data dengan seluruh fasilitas kesehatan di Kota 	
	IGIS (<i>Digital Information System</i>) Puskesmas termasuk antrian Online BPJS untuk kemudahan pelayanan pasien BPJS	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Perwali pendukung • SK pendukung • Surat ket Kerjasama/MoU integrasi pada BPJS dan Capil 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Peralatan pen-<i>support</i> pelayanan antrian pelayanan Kesehatan • Pengembangan aplikasi <i>E-DIGIS</i> PKM dan SIANPUS 		Kemudahan akses pelayanan kesehatan
	Layanan Jemput Bola Pemeriksaan Gratis (<i>Home Care Service</i>) dan Layanan Ambulan Gratis	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Jejaring Puskesmas dan fasilitas Kesehatan Lainnya • Perisapan sarana dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan kepada SDM agar memberikan pelayanan terbaik 	Layanan sudah bisa dinikmati di seluruh Kota	Pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
		prasarana home service			
	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota • Penetapan Kebijakan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 	Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		
	penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		
	Program Pembangunan <i>Smart</i> PJU	Pembangunan <i>Smart LED</i> di Wilayah Alun Alun yang ramah lingkungan dan hemat energi	Pembangunan <i>Smart LED</i> di Wilayah Alun Alun yang ramah lingkungan dan hemat energi	Pembangunan <i>Smart LED</i> di alun alun dan seluruh ruas jalan Kota pasuruan	
	Program Penyediaan Layanan Angkutan Wisata Yang	Penyediaan Angkutan Wisata yang ramah lingkungan, hemat energi dan terintegrasi	Pengembangan dari Penyediaan Angkutan Wisata yang ramah lingkungan, hemat energi dan terintegrasi	Pengembangan transportasi umum & bus sekolah (<i>real-time tracking system</i>)	

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
	Terintegrasi			menggunakan GPS & <i>maps</i>)	
	Program Pembangunan Kawasan Pelabuhan	Penyusunan kelembagaan dan kajian pembangunan Kawasan Pelabuhan yang Indah, Bersih dan Nyaman	Meningkatkan dan Mempermudah akses Simpul Transportasi dan Kunjungan Wisataan	Pengoperasian kawasan pelabuhan logistik dan perikanan sebagai pelabuhan pengumpan	Pembangunan dan pengoperasian kawasan pelabuhan logistik dan perikanan sebagai pelabuhan pengumpan

5.5 Peta Jalan *Smart Society*

Tabel 14. Roadmap Pembangunan Smart Society 2022-2031

Dimensi	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH	JANGKA PANJANG
---------	------------------	---------------	-----------------	----------------

Smart City		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
SMART SOCIETY	Program Pengembangan Minat Baca dan pembinaan perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha Pengembangan SDM Berbasis IT bagi Aparatur • Pengadaan jaringan internet 	Pengembangan Jaringan Internet dengan pemeliharaan dan pengadaan <i>server</i>	Meningkatkan literasi dengan sistem digitalisasi berbentuk buku <i>online</i>	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Meningkat
	Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah	MoU dengan lembaga lembaga yang berhubungan dengan kearsipan	Pengembangan Jaringan Internet dengan pemeliharaan dan pengadaan <i>server</i>	Meningkatkan literasi dengan sistem digitalisasi berbentuk buku <i>online</i>	Persentase Peningkatan Khasanah Arsip Statis meningkat
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Peningkatan Koordinasi dengan Instansi Lain dan Stake holder perihal pengelolaan arsip sesuai standar nasional	MoU dengan lembaga lembaga yang berhubungan dengan kearsipan		
	Program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintensifkan pelaksanaan pengawasan dan penindakan perda 	Pengadaan Gedung, Kendaraan, Perlengkapan kantor (komputer dll), Sarpras perorangan/personel: Pakaian seragam,	Sosialisasi Penyuluhan terkait peningkatan tugas dan peran serta linmas. Menunjukkan intensitas linmas di	

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
		<ul style="list-style-type: none"> • mengintensifkan pelaksanaan operasi penyakit masyarakat • mengintensifkan pelaksanaan perlindungan masyarakat 	peralatan perorangan misal (HT, Rompi dll)	masyarakat dan eksistensi linmas dalam penanganan ketentraman dan ketertiban linmas	
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • pembinaan peningkatan kapasitas satgas linmas dan satlinmas • pendidikan dan pelatihan linmas 	<ul style="list-style-type: none"> • pembinaan peningkatan kapasitas satgas linmas dan satlinmas • pendidikan dan pelatihan linmas 		
	Program Pengendalian Penduduk	MoU dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunkan jumlah penduduk • Menurunkan <i>Unmet Need</i> (kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga) • Aplikasi 	Peningkatan sistem informasi kependudukan yang terintegrasi

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
			KB yang belum terpenuhi) <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Usia Kawin Pertama Perempuan 	sistem informasi kependudukan yang terintegrasi dengan data kependudukan Dispendukcapil	dengan data kependudukan Dispendukcapil
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	SK Walikota ttg Tim Jejaring Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga	Pengembangan Aplikasi PERKASA (Perempuan Kepala Keluarga Sejahtera)	Pendampingan dan Bantuan Modal Usaha untuk Perempuan Kepala Keluarga	Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan keikutsertaan keluarga dalam kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS) Meningkatkan 		Meningkatnya Keluarga Sejahtera	

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
		jumlah Masyarakat yang mendapat pelayanan dari Mitra Kerja			
	Program pengelolaan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> meningkatkan jumlah peserta ujian paket A, B, C menurunkan pembiayaan yang bersifat bukan prioritas mendahulukan pembelian yang operasional dan prioritas Penyediaan perlengkapan siswa (seragam) baik siswa di 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas mobil Inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus pendataan sarpras sekolah yang rusak sedang/berat untuk diajukan perbaikan penyediaan pengadaan perlengkapan sekolah (Genset, laptop, dsb) 	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan SPOT suropati (lks <i>Online</i>) melakukan bimtek Dapodik melakukan bimtek Sistem pelaporan yang sudah disediakan oleh Pusdatin Kemdikbud 	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
		sekolah negeri maupun swasta	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan jaringan internet dan mendayagunakan website yang ada di UPT sekolah maupun di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan 		
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Menjalin kerjasama antar OPD terkait / Membuat perjanjian kerjasama terkait data kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> Membuat layanan kesejahteraan sosial secara online Pengadaan jaringan internet dan server lokal sebagai penampung 	<ol style="list-style-type: none"> Proses pendataan warga (DTKS) lebih efektif dan selektif Penerima layanan kesejahteraan sosial lebih terarah dan tepat sasaran 	Peningkatan Layanan Kesejahteraan Sosial

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
			data hasil verifikasi dan validasi (DTKS)	(penerima bansos)	

5.6 Peta Jalan *Smart Environment*

Tabel 15. Roadmap Pembangunan Smart Environment 2022-2031

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
<i>SMART ENVIRONMENT</i>	Tata Kelola sampah terintegrasi	Perwali tentang sampah	Pengadaan sarana dan prasarana tata kelola sampah	Bimbingan teknis kepada kelompok masyarakat tentang pengelolaan sampah	Tidak ada lagi sampah di jalan, pemukiman dan seluruh wilayah pasuruan.
	Program kota tanpa kumuh	Perwali tentang kawasan kumuh	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Perkampung 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan kampung 	

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
			<ul style="list-style-type: none"> • n Tematik (lanjutan) • Perluasan Makam <i>Estate</i> • Pembangunan wisata mangruf sepanjang garis pantai • Penyediaan lahan parkir 	<ul style="list-style-type: none"> • kuliner • Membangun Aplikasi SPASI (Sistem Pemetaan, Aset Prasarana Sarana Infastruktur) 	Penurunan Kawasan kumuh
	Program pemanfaatan sinar matahari sebagai <i>solar cell</i>	Perwali tentang <i>solar cell</i>	Pengadaan sarana dan prasarana <i>solar cell</i>	Bimtek tentang <i>solar cell</i>	Penggunaan tenaga matahari sudah efisien dan menyeluruh
	Program aman bencana	Berkerjasama dengan pihak ketiga	Pembuatan mitigasi bencana	Sosialisasi kepada Masyarakat, relawan, akademisi	Dampak bencana terminimalisir
	Program Pembangunan Kampung	Menyusun masterplan potensi kawasan RTH	Pembangunan RTH Tematik	Pembangunan RTH Tematik	Pemenuhan RTH sesuai regulasi

Dimensi <i>Smart City</i>	Program/Kegiatan	JANGKA PENDEK	JANGKA MENENGAH		JANGKA PANJANG
		Tahap 1 Inisiasi	Tahap 2 Pengembangan	Tahap 3 Pendayagunaan	Tahap 4 Penyempurnaan
		2022	2023-2024	2024-2026	2027-2031
	Tematik	tematik			pemanfaatan lahan

BAB VI PENUTUP

Alhamdulillah, Kota Pasuruan ikut terpilih sebagai bagian dari program gerakan smart city nasional yang telah di inisiasi dan digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sejak tahun 2017 sampai 2020 Kemenkominfo telah berhasil melaksanakan pendampingan kepada 100 kabupaten/kota dalam Gerakan Menuju 100 *Smart City*. Pada tahun 2021 ini program *Smart City* Kemenkominfo diikuti oleh 47 kabupaten/kota yang tergabung dalam kawasan pariwisata prioritas nasional dan kawasan ibu kota negara-baru.

Buku masterplan ini disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dimulai dari tahun 2022 sampai dengan 2031 dengan tujuannya agar bisa menjadi panduan atau arahan dalam mewujudkan pembangunan kota Pasuruan yang berkelanjutan. Untuk keberlangsungan program smart city, dalam mewujudkan kota yang maju ekonominya indah kotanya dan harmoni melalui teknologi informasi tepat guna benar-benar dapat terwujud dalam sepuluh tahun kedepan, maka perlu dibuatkan peraturan daerahnya.

Buku II ini merupakan bagian dari *Guideline Masterplan Smart City* Kota Pasuruan. Arahan pembangunan *smart city* ini masih terus dikembangkan dan diselaraskan dengan rencana-rencana pembangunan lain dalam agenda membangun Kota Pasuruan. *Masterplan* ini dihasilkan melalui analisis kondisi geografis, kesenjangan daerah, serta solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Kota Pasuruan dan kemudian rangkuman dari dokumen perencanaan pembangunan yang telah diatur melalui dokumen RPJMD dan RPJPD Kota Pasuruan. *Masterplan smart city* ini diharapkan dapat melengkapi dan mendukung dokumen perencanaan pembangunan Kota Pasuruan kedepan.

Teknologi informasi dan komunikasi menjadi *enabler* untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, bertanggungjawab, dan transparan serta pelayanan publik yang cepat dan mudah. Harapan kedepan, penanganan berbagai permasalahan birokrasi dan urusan masyarakat menjadi semakin lebih mudah, cepat, dan efisien. Peningkatkan kualitas hidup masyarakat oleh karena proses birokrasi dan pelayanan publik yang lebih baik, perbaikan infrastruktur dan prasarana untuk kenyamanan publik, serta peningkatan daya saing ekonomi masyarakat kota Pasuruan adalah sebagai sasaran dari program *smart city*. Kerjasama antar instansi atau multi-sektor juga diperlukan untuk mensukseskan proses implementasi pembangunan dan pengembangan *smart city* kota Pasuruan. Tujuannya agar komponen masyarakat dapat merasakan perubahan yang positif daripada pelaksanaan program *smart city*.

Lampiran 1 Program dan Anggaran

Kode	Program	Leading Sector	Tahun Pelaksanaan	Sumber Anggaran	Indikasi Kebutuhan Anggaran (dalam Ribuan)
<i>SMART GOVERNANCE</i>					
G.1.1.1.P.1.C.1	Integrasi penerbitan KK KTP-el status kawin dengan KUA melalui inovasi JALAN BERDUA dengan Ojek Layanan Publik.	Dinas Dukcapil	2022-2031	APBD	81.000.000
G.1.2.1.P.2.A.1	Pelayanan Adminduk di Mall Pelayanan Publik.	Dinas Dukcapil	2022-2031	APBD	196.000.000
G.1.3.1.P.3.B.1	Integrasi Penerbitan akta kematian dengan layanan rumah sakit.	Dinas Dukcapil	2022-2031	APBD	77.000.000
G.1.4.1.P.4.B.2	Integrasi penerbitan Akta Kematian dengan layanan ijin pemakaman.	Dinas Dukcapil	2023-2031	APBD	50.000.000
G.1.5.1.P.5.A.2	Pemanfaatan data kependudukan oleh OPD dalam rangka Membangun Portal Data Elektronik.	Dinas Dukcapil	2022-2031	APBD	40.000.000
G.1.6.2.P.6.D.1	CSR dan kerjasama	Diskomin fotik	2022-2031	APBD	-

G.2.1.1.P. 7.C.2	Membangun aplikasi layanan kelurahan	Kecamatan	2022-2031	APBD	70.000.000
G.2.2.1.P. 8.C.3	Membangun <i>website</i> Bakesbangpol Mantab (Menjaga stabilitas wilayah)	Bakesbangpol	2022-2031	APBD	150.000.000
G.2.5.1.P. 9.D.2	Fasilitasi Kerjasama	Bagian Pemerintahan	2022-2031	APBD	80.000.000
G.2.6.1.P. 10.D.3	Fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	Bagian Organisasi	2022-2031	APBD	120.000.000
G.2.5.1.P. 11.A.3	Pengelolaan Kelembagaan dan Anaisis Jabatan	Bagian Organisasi	2022-2031	APBD	70.000.000
G.2.5.1.P. 12	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	2022-2031	APBD	70.000.000
G.1.4.1.P. 13.C.4	Membangun aplikasi terpadu (perencanaan, keuangan dan pengawasan) berbasis satu pintu data	Bapelitbangda, BPKA, Inpektora t	2022-2031	APBD	70.000.000
G.2.3.1.P. 14.C.5	Membangun system aplikasi perencanaan yang terintegrasi dengan perangkat daerah (<i>Paperless</i>)	Bapelitbangda	2022-2031	APBD	70.000.000

G.3.1.1.P. 15.D.4	Menggandeng/k erjasama dengan akademisi dalam penyusunan SOP yang efisien, akurat dan sederhana	Bagian Organisa si, Bagian Pemerint ahan	2022- 2031	APBD	70.000.00 0
G.2.P.16.C .6	Pengembangan Aplikasi Kepegawaian (SIMASKOT)	Badan Kepegawa ian Daerah	2022- 2031	APBD	250.000.0 00
G.2.P.17.D .5	Pengembangan kompetensi ASN	Badan Kepegawa ian Daerah	2022- 2031	APBD	20.000.00 0.000
SMART BRANDING					
B.1.1.2.P.1 .C.1	Program aplikasi informatika	DISKOM FOTIK bidang layanan <i>e-gov</i>	2022- 2026	APBD	2.368.978. 844
B.1.1.2.D. 1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	DISKOM FOTIK bidang Informasi layanan publik	2022- 2026	APBD	15.974.44 5.944
B.1.1.2.P.5 .D2	Program Pemasaran Pariwisata	Disparpo ra	2022- 2031	APBD	650.000.0 00
B.1.2.2.P.6 .B.1	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Disparpo ra	2022- 2031	APBD dan DAK	1.000.000. 000
B.1.3.3.P.7 .B.2	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan	Disparpo ra	2022- 2031	APBD	350.000.0 00

	Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				
B.3.1.1.P.8 .B.3	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disparpora	2022-2031	APBD	800.000.000
B.2.3.1.P.2 .A.1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP	2022-2031	APBD	500.000.000
B.2.4.2.P.4 .A.2	Program Pelayanan Penanaman Modal (dengan Penyediaan Pelayanan Terpadu satu atap)	DPMPTSP	2022-2031	APBD	3.331.775.605
B.2.1.3.A. 3	Kegiatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Secara Terpadu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah (MPP)	-	-	-	-
<i>SMART ECONOMY</i>					
Ec.2.1.1.P. 1.D.1	Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan pencaker.				
a.	Pelatihan ketrampilan kerja bagi pencaker	Disnaker	2022-2031	APBD	2.300.000.000
b.	Pelatihan ketrampilan	Dinas Koperasi	2022-	APBD	500.000.0

	dan manajemen pelaku usaha.	dan Usaha Mikro	2031		00
c.	Pelatihan teknis, industri dan pengolahan.	Disperindag	2022-2031	APBD	650.000.000
Ec.2.2.1.P.2.A.1	Pemberdayaan ekonomi masyarakat				
a.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas pertanian dan KP	2022-2031	APBD	350.000.000
b.	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Dinas perikanan	2022-2031	APBD	350.000.000
c.	Pemberdayaan IKM logam dan mebel	Disperindag	2022-2031	APBD	650.000.000
Ec.1.1.2.P.3.A.2	Pemantauan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok.				
a.	<i>Monitoring</i> harga kebutuhan bahan pokok.	Disperindag	2022-2031	APBD	400.000.000
b.	Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	Bagian Adm. Perekonomian dan Sumber Daya Alam	2022-2031	APBD	30.000.000

Ec.3.1.3.P. 4.C.1	Pengembangan Sistem dan peningkatan pelayanan pajak daerah.				
a.	Pelayanan mobil keliling.	Bapenda	2022-2031	APBD	852.000.000
b.	Pengembangan sistem pelayanan pajak daerah.	Bapenda	2022-2031	APBD	1.600.000.000
Ec.3.2.3.P. 5.B.1	Pengembangan jaringan pemasaran <i>online</i> .				
a.	Pelatihan pemasaran secara <i>online</i> bagi pelaku usaha.	Disperindag, Dinkop UM	2022-2031	APBD	500.000.000
<i>SMART LIVING</i>					
Lv.1.3.1.P. 1.B.1	Program Penataan Sarana Dan Prasarana Pendukung Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2026	APBD	50.708.864.20
Lv.1.4.1.P. 4.B.2	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2026-2028	APBD	2.500.000.000
Lv.1.1.1.P. 3.B.3	Program penyelenggaraa n penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2026-2031	APBD	1.868.000.000
Lv.1.2.1.P. 5.B.4	Peningkatan sarana dan prasarana	Dinas Pekerjaan Umum	2026-2028	APBD	1.458.200.000

	publik yang ramah lingkungan	dan Penataan Ruang			
Lv.2.2.2.P. 14.C.1	Pemanfaatan Aplikasi DIGIS (<i>Digital Information System</i>) Puskesmas termasuk antrian <i>Online</i> (SIANPUS) untuk kemudahan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	DINKES	2022	APBD	335.972.000,00
Lv.2.3.2.P. 15.C.2	PSC 119 (<i>PUBLIC SAFETY CENTER-119</i>) sebagai bentuk Layanan Jemput Bola Pemeriksaan Gratis (<i>Home Care Service</i>) dan Layanan Ambulan Gratis	DINKES	2022	APBD	2.099.999.000,00
Lv.2.4.2.C. 3	SINAPKES (SISTEM INFORMASI PERIJINAN TENAGA KESEHATAN) untuk penerbitan surat ijin praktek bagi tenaga kesehatan	DINKES	2022	APBD	25.085.130,00
Lv.2.2.2.C. 4	<i>E-JKN</i> untuk pencatatan dan pelaporan pemanfaatan dana kapitasi	DINKES	2022	APBD	30.000.000

	BPJS				
Lv.2.2.2.C.5	layanan <i>e-rekam</i> medis	RSUD dr. R. Soedarsono	2021-2022	BLUD	850.000.000
Lv.2.4.2.A.1	Layanan pengantaran obat pasien rawat jalan khusus pasien di Wilayah Kota Pasuruan	RSUD dr. R. Soedarsono	2022	BLUD	60.000.000
Lv.2.3.2.A.2	layanan <i>home care</i>	RSUD dr. R. Soedarsono	2022	BLUD	70.000.000
Lv.	Pemenuhan layanan OK <i>central</i>	RSUD dr. R. Soedarsono	2022-2023	DAK	40.500.000.000
Lv.	pengembangan layanan rehabilitasi medik	RSUD dr. R. Soedarsono	2023	DBHCH T	4.000.000.000
Lv.	layanan klinik eksekutif dan layanan VVIP pasien rawat inap	RSUD dr. R. Soedarsono	2024-2025	DAK	44.000.000.000
Lv.	layanan jantung dan pembuluh darah	RSUD dr. R. Soedarsono	2026	DBHCH T	20.000.000.000
Lv.	layanan bedah urologi	RSUD dr. R. Soedarsono	2026	DBHCH T	10.000.000.000
SMART SOCIETY					

S.2.1.1.P.1 .D.1	Program Pengembangan Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2027-2031	APBD	250.000.000.000
S.3.1.1.P.2 .A.1	Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah	-	-	-	-
S.3.2.1.P.3 .A.2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	-	-	-	-
S.3.3.5.P.4 .A.3	Program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan	2027-2031	APBD	19.321.475.000
S.3.4.5.P.5 .A.4	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan	2022-2026	APBD	5.007.481.632
S.3.4.5.A.5	Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan	2022-2026	APBD	1.453.746.0086
S.3.4.5.D. 2	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kab/Kota	-	-	-	-
S.1.1.2.P.6	Program Pengendalian	Dinas Pemberda	2027-	APBD /	2.095.099.

.A.5	Penduduk	yaan Perempu an , Perlindun gan Anak dan Keluarga Berencan a (DP3AKB)	2031	DAK	440
S.1.2.2.P.7 .A.6	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberda yaan Perempu an , Perlindun gan Anak dan Keluarga Berencan a (DP3AKB)	2027-2031	APBD	1.323.000.000
S.1.3.2.P.8 .A.7	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pemberda yaan Perempu an , Perlindun gan Anak dan Keluarga Berencan a (DP3AKB)	2027-2031	APBD	9.408.069.440
S.2.2.4.P.9 .A.8	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidika n dan Kebudayaan	2022-2031	APBD	59.056.484.265
S.2.2.4.D. A.9	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidika n dan Kebudayaan	2022-2031	APBD	-

S.2.2.4.A.1 0	Program pengembangan kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2023-2031	APBN	25.017.000.000
S.2.2.5.A.1 1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kota)	Dinsos	2022-2026	APBD	1.297.725.054
<i>SMART ENVIRONMENT</i>					
En.2.1.P.1. A.1	Tata Kelola sampah terintegrasi	DLHKP	2022-2031	APBD,A PBN	20.000.000.000
En.2.1.P.2. A.2	Program Kota tanpa kumuh	DPRKP	2022-2031	APBD,A PBN	75.000.000.000
En.1.1.P.4. A.3	Program aman bencana	BPBD	2022-2031	APBD,A PBN	10.000.000.000
En.3.1.P.3. B.1	Program ketersediaan energi Terbarukan	DLHKP	2022-2031	APBD,A PBN	25.000.000.000

Lampiran 2 Roadmap Implementasi *Smart City: Smart Governance*

NO	1. PROGRAM KERJA	2. TUJUAN	3.SASARAN	4.INDIKATOR KEBERHASILAN	5.USULAN ANGGARAN	6. SUMBER PEMBIAYAAN	7. PELAKSANA	8. KERJA SAMA	09.TIMELINE
1	Integrasi penerbitan KK KTP-el status kawin dengan KUA melalui inovasi JALAN BERDUA dengan Ojek Layanan Publik.	Terwujudnya integrasi dan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD/Lembaga	Masyarakat	Jumlah layanan KK KTP yang terintegrasi dengan KUA	81.000.000	APBD	Dinas Dukcapil	KUA	2022 s/d 2031
2	Pelayanan Adminduk di Mall Pelayanan Publik.		Masyarakat	Jumlah layanan adminduk di Mal Pelayanan	196.000.000	APBD			2022 s/d 2031
3	Integrasi Penerbitan akta kematian dengan layanan rumah sakit.		Masyarakat	Jumlah layanan akte kematian yang terintegrasi dengan Rumah Sakit	77.000.000	APBD		Rumah Sakit	2022 s/d 2031

4	Integrasi penerbitan Akta Kematian dengan layanan izin pemakaman.		Masyarakat	Jumlah layanan akte kematian yang terintegrasi dengan ijin pemakaman	50.000.000	APBD		Dinas Perkim	2023 s/d 2031
5	Pemanfaatan data kependudukan oleh OPD dalam rangka membangun Portal Data Elektronik.		Masyarakat	Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	40.000.000	APBD		Bapenda, DPMTSP, DP3AK, Diskominfo	2022 s/d 2031
6	CSR dan kerjasama	Meningkatkan peran serta <i>stakeholder</i> /mitra pemerintahan dalam pembangunan daerah berkelanjutan terkait pemenuhan sarana prasarana internet gratis bagi	RT/RW	Prosentase kelurahan yang mendapatkan jaringan internet gratis		APBD	Diskominfo	Provider	2022 s/d 2031

		masyarakat							
7	Membangun aplikasi layanan kelurahan	Meningkatkan kemudahan layanan masyarakat melalui kelurahan ke kecamatan	Masyarakat	Prosentase kelurahan yang memanfaatkan aplikasi terintegrasi	70.000.000	APBD	Kecamatan	Diskominfotik / Pihak ketiga	2022 s/d 2031
8	Membangun <i>website</i> Bakesbangpol Mantab (Menjaga stabilitas wilayah)	Mencegah konflik	Masyarakat, Partai, Ormas/ LSM	Tercapainya 10 informasi konten stabilitas wilayah	150.000.000	APBD	Bakesbangpol	diskominfotik	2022 s/d 2031
9	Fasilitasi Kerjasama	Meningkatkan Kesepakatan dan Perjanjian Antar PD dan Pihak Ketiga	PD dan swasta	Tercapainya kesepakatan antara Pemerintah Kota dengan pihak ketiga	80.000.000	APBD	Bagian Pemerintahan		2022 s/d 2031

10	Fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	Meningkatkan inovasi pelayanan publik perangkat daerah	UPP (Unit Pelayanan Publik)	Terciptanya inovasi pelayanan publik	120.000.000	APBD	Bagian Organisasi		2022 s/d 2031
11	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pengembangan aplikasi analisis jabatan	PD	Persentase jumlah perangkat daerah yang memiliki analisis jabatan	70.000.000	APBD	Bagian Organisasi	BKD Kota Pasuruan dan BKN	2022 s/d 2031
12	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Integrasi sistem aplikasi dengan SAKIP	PD	Tercapainya integrasi data kinerja dalam aplikasi SIJAJA (Sistem Informasi Jabatan dan Kinerja) dengan SAKIP	70.000.000	APBD	Bagian Organisasi	Bappelitbangda dan Kementerian RB	2022 s/d 2031
13	Membangun aplikasi terpadu (perencanaan, keuangan dan pengawasan) berbasis satu	Menyelaraskan perencanaan, keuangan dan pengawasan	Bappelitbangda, BPKA, Inpektorat	Prosentase keselarasan antara perencanaan, keuangan dan pengawasan	70.000.000	APBD	Bappelitbangda, BPKA, Inpektorat	diskominfotik / Pihak ketiga	2022 s/d 2031

	pintu data	n							
14	Membangun sistem aplikasi perencanaan yang terintegrasi dengan perangkat daerah (<i>Paperless</i>)	Meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan terintegrasi dengan sistem capaian kinerja pegawai berbasis IT	PD	Prosentase PD yang tertib dalam penyusunan dokumen perencanaan	70.000.000	APBD	Bapelitbangda	diskominfotik / Pihak ketiga	2022 s/d 2031
15	Menggandeng/kerjasama dengan akademisi dalam penyusunan SOP yang efisien, akurat dan sederhana	Mendisiplinkan PD dalam menyelesaikan layanan sesuai SOP	PD	Prosentase perangkat daerah yang mengimplementasikan kebijakan sesuai SOP	70.000.000	APBD	Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan	diskominfotik / Pihak ketiga	2022 s/d 2031
16	Pengembangan Aplikasi Kepegawaian (SIMASKOT)	Meningkatkan updating data kepegawai	ASN	Data kepegawaian yang Valid dan layanan di bidang	250.000.000	APBD	Badan Kepegawaian Daerah	diskominfotik / Pihak ketiga	2022 s/d 2031

		an dan pelayanan di bidang kepegawain		kepegawain yang tepat waktu dan tepat sasaran					
17	Pengembangan kompetensi ASN	Kompetensi ASN yang meningkat	ASN	Indeks profesionalitas ASN yang meningkat	20.000.000.000	APBD	Badan Kepegawain Daerah	BPSDM dan Pihak Ketiga	2022 s/d 2031

Lampiran 3 Roadmap Implementasi *Smart City: Smart Branding*

N O	1. PROGRAM KERJA	2. TUJUAN	3. SASARAN	4. INDIKATOR KEBERHASILAN	5. USULAN ANGGARAN	6. SUMBER PEMBIAYAAN	7. PELAKSANA	8. KERJASAMA	09. TIME LINE
1	Program aplikasi informatika	Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik (OPD dan Masyarakat)	Persentase Peningkatan Aplikasi yang terintegrasi	2.368.978.844,00	APBD	DISKOMFOTIK bidang layanan e-gov		2022-2026
				Persentase Layanan Jaringan	29.532.376.575,00	APBD	DISKOMFOTIK bidang	Pihak Ketiga (MVnet)	2022-2026

				yang ditindaklanjuti			layanan <i>e-gov</i>		
				Persentase Pengamanan Informasi dan Dokumentasi		APBD	DISKOMFOTIK bidang layanan <i>e-gov</i>		2022-2026
2	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik (Masyarakat dan OPD)	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	15.974.445.944,00	APBD	DISKOMFOTIK bidang Informasi layanan publik	domain pasuruankota.go.id. tv JTV, media masa cetak maupun elektronik	2022-2026
				Persentase informasi yang dipublikasikan melalui media		APBD	DISKOMFOTIK bidang Informasi layanan publik	tv, media masa cetak maupun elektronik	2022-2026
				Persentase informasi berbasis masyarakat yang dibina		APBD	DISKOMFOTIK bidang Informasi layanan	masyarakat perwakilan di tiap kelurahan	2022-2026

							publik	(KIM) kelompok informasi masyarakat	
3	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Pasuruan	Wisatawan	Persentase kenaikan wisatawan	650.000.000,00	APBD	Disparpora		2022-2031
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		Masyarakat	Persentase peningkatan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	1.000.000.000,00	APBD dan DAK	Disparpora		2022-2031
5	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		Masyarakat	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang berkembang	350.000.000,00	APBD	Disparpora		2022-2031
6	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Wisatawan	Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola	800.000.000,00	APBD	Disparpora		2022-2031

				Pembangunan Kawasan Wisata Religi, Kawasan Herritage, dan Kawasan Wisata (Arafah di <i>Exit</i> Tol), dan Wisata Petik Jambu Kristal, Blimbing Madu, dan Alpukat Buto					
7	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya daya tarik investasi	pelaku usaha	Jumlah realisasi investasi	500.000.000,00	APBD	DPMPTSP		2022-2031
8	Program Pelayanan Penanaman Modal (dengan Penyediaan Pelayanan Terpadu satu atap)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan	Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal	3.331.775.605,00	APBD	DPMPTSP		2022-2031

9	Kegiatan Pelayanan Perijinan dan Non-Perijinan Secara Terpadu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah (MPP)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lampiran 4 Roadmap Implementasi *Smart City: Smart Economy*

NO	1. PROGRAM KERJA	2. TUJUAN	3. SASARAN	4. INDIKATOR KEBERHASILAN	5. USULAN ANGGARAN	6. SUMBER PEMBIAYAAN	7. PELAKSANA	8. KERJASAMA	09. <i>TIMELINE</i>
1	Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan pencaker.								
	a. Pelatihan ketrampilan kerja bagi pencaker.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Pencari kerja terdaftar yang dilatih	Persentase peserta pelatihan yang sudah mendapatkan pekerjaan	2.300.000.000	APBD	Disnaker	BLK, LPK	2022-2031

	b. Pelatihan ketrampilan dan manajemen pelaku usaha.	Meningkatnya produktivitas usaha mikro	Pelaku usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang naik kelas ke usaha kecil	500.000.000	APBD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pihak perbankan, lembaga pelatihan	2022-2031
	c. Pelatihan teknis, industri dan pengolahan.	Meningkatnya produktivitas IKM	Pelaku usaha kecil	Persentase pertumbuhan IKM	650.000.000	APBD	Disperindag	Balai diklat	2022-2031
2	Pemberdayaan ekonomi masyarakat								
	a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat dan menambah pendapatan melalui hasil produksi tanaman sayur	kelompok masyarakat	skor pola pangan nilai tukar petani	350.000.000	APBD	Dinas pertanian dan KP	Dinas pertanian provinsi jatim, Kementerian pertanian	2022-2031

	B1.1. 1. b. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Meningkatnya produk olahan perikanan	Poklahsar	nilai produksi olahan perikanan	350.000.000	APBD	Dinas perikanan	Dinas kelautan dan perikanan provinsi jatim, Kementerian kelautan dan perikanan	2022-2031
	c. Pemberdayaan IKM logam dan mebel	Meningkatnya volume hasil produksi logam dan mebel	pelaku usaha logam dan mebel	nilai produksi logam dan mebel	650.000.000	APBD	Disperindag	Perusahaan manufaktur	2022-2031
3	Pemantauan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok.								
	a. Monitoring harga kebutuhan bahan pokok.	Terwujudnya kestabilan harga bahan pokok	Pedagang pasar tradisional	Rata-rata persentase fluktuasi harga bahan pokok	400.000.000	APBD	Disperindag	Bulog, Disperindag provinsi	2022-2031

	b. Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	Terwujudnya pengendalian inflasi daerah	pedagan g	Jumlah laporan kinerja TPID	30.000.000	APBD	Bagian Adm. Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bank Indonesia, BPS, Indag, Dishub, Pertanian, Diskominf o, Perikanan, Bappeda, BPKA, Kadin, Hiswana migas, Bulog, PLN.	2022-2031
4	Pengembangan Sistem dan peningkatan pelayanan pajak daerah.								
	a. Pelayanan mobil keliling.	Meningkatnya kepuasan wajib pajak	wajib pajak	Indeks kepuasan pelayanan wajib pajak daerah	852.000.000	APBD	Bapenda	Kelurahan,	2022-2031
	b. Pengembangan sistem pelayanan pajak daerah.	Meningkatnya PAD	wajib pajak	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	1.600.000.000	APBD	Bapenda	Bank Jatim, kecamatan, OPD Penghasil,	2022-2031

								satpol pp, DPMPTSP	
5	Pengembangan jaringan pemasaran <i>online</i> .								
	a. Pelatihan pemasaran secara <i>online</i> bagi pelaku usaha.	Meningkatkan omzet UMKM	Pelaku usaha UMKM	Rata-rata kenaikan omzet UMKM pertahun	500.000.000	APBD	Disperindag, Dinkop UM	<i>Start up, market place</i>	2022-2031

Lampiran 5 Roadmap Implementasi *Smart City: Smart Living*

NO	1. PROGRAM KERJA	2. TUJUAN	3.SASARAN	4. INDIKATOR KEBERHASILAN	5. USULAN ANGGARAN	6.SUMBER PEMBIAYAAN	7.PELAKSANA	8.KERJASAMA	09. TIMELINE
1	Program Penataan Sarana Dan Prasarana Pendukung Perkotaan	Revitalisasi Kawasan Alun Alun Ramah Difabel	Sarana dan Prasarana Ramah difabel di alun alun yang ditingkatkan	Sarana dan Prasarana Ramah difabel di alun alun yang ditingkatkan	Rp. 50.708.864.20	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2026
								Kelompok Informasi	

								Masyarakat (KIM), forum komunikasi kelompok sosial maupun jaringan informasi lain yang sudah ada	
2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANYA	Pembangunan <i>Solar Panel</i> di Wilayah Alun Alun (Berbentuk Payung) <i>Solar Panel</i> Menyimpan daya guna distirbusikan ke wilayah sekitar	Menarik Minat Wisatawan di daerah lain serta mengantikan ikon kota pasuruan sebagai Kota Madinah	Pembangunan Payung <i>Solar Panel</i> di beberapa titik di alun alun Kota	Rp. 2.500.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	akademisi, bisnis, pemerintah, media dan komunitas melalui forum Smart City	2026-2028

		Pembangunan <i>Food Center</i> di samping alun alun guna memperkembangkan wisata kuliner di Kota Pasuruan		Terbangunya Akses Wisata kuliner di Kota Pasuruan	Rp. 895.500.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2026
		Pembangunan Air Mancur Menari di tengah tengah Alun Alun guna memperkembangkan tugu Kota Pasuruan kepada wisatawan		Terbangunya Sarana dan Prasarana pendukung di alun alun Kota Pasuruan	Rp. 1.000.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	2027
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Revitalisasi Kawasan Pemukiman Pesisir Kota Pasuruan	Kawasan Pemukiman penduduk Pesisir	Kawasan Pemukiman penduduk Pesisir yang Ditingkatkan	Rp. 1.868.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2026-2031

		dari Kawasan Kumuh Menjadi kawasan kampung seni	yang Terevitalisasi						
								Badan Pertanahan Nasional (BPN)	
								akademisi, bisnis, pemerintah, media dan komunitas melalui forum <i>Smart City</i>	
								akademisi, bisnis, pemerintah, media dan komunitas melalui forum <i>Smart City</i>	

4	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENATAAN RUANG	Revitalisasi Kawasan Kota Tua Menjadi ikon Kota Pasuruan	Bangunan di Kota Tua yang dipelihara serta Meningkatkan Nilai Estetika pada bangunan yang ada	Bangunan Kota Tua di kota pasuruan yang ditingkatkan sarana dan Prasarana ya	Rp. 987.500.0 00	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2026- 2031
								Sosialisasi melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), forum komunikasi kelompok sosial maupun jaringan informasi lain yang sudah	

								ada	
5	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUBLIK YANG RAMAH LINGKUNGAN	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pesepedah di Kota Pasuruan	Presentase Sarana dan Prasarana Pesepedah di Kota yang ditingkatkan	Sarana dan prasarana pesepedah yang terbangun	Rp. 1.458.200.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2026-2028
								kampanye melalui publikasi media massa <i>offline</i> dan <i>online</i> , serta media sosial	

Lampiran 6 Dinas Kesehatan

NO	1.PROGRAM KERJA	2. TUJUAN	3.SASARAN	4. INDIKATOR KEBERHASILAN	5. USULAN ANGGARAN	6. SUMBER PEMBIAYAAN	7. PELAKSANA	8.KERJASAMA	09. TIMELINE
----	-----------------	-----------	-----------	---------------------------	--------------------	----------------------	--------------	-------------	--------------

1	Pemanfaatan Aplikasi DIGIS (<i>Digital Information System</i>) Puskesmas termasuk antrian <i>Online</i> (SIANPUS) untuk kemudahan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Kemudahan akses pelayanan kesehatan	Masyarakat Kota Pasuruan	- Jumlah aplikasi yang dibangun dan dilakukan pengembangan/pemeliharaan (aplikasi) - Jumlah laporan terkait pengelolaan data dan informasi yang tersusun (laporan)	335.972.000,00	APBD	DINKES	Aplikasi <i>Center View</i> Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur; Aplikasi <i>P-care</i> BPJS, Aplikasi MMC Diskominfo dan Aplikasi SIAK Dispendu capil;	2022
2	PSC 119 (<i>PUBLIC SAFETY CENTER-119</i>) sebagai bentuk Layanan Jemput Bola Pemeriksaan Gratis (<i>Home Care Service</i>) dan Layanan Ambulan Gratis	Pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Masyarakat Kota Pasuruan dengan keadaan / kasus kegawatdaruratan	Persentase kasus kegawatdaruratan yang melapor dan ditangani (%)	2.099.999.000,00	APBD	DINKES	BPBD, RSUD, PUSKEMAS	2022

3	SINAPKES (SISTEM INFORMASI PERIJINAN TENAGA KESEHATAN) untuk penerbitan surat ijin praktek bagi tenaga kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui pemenuhan tenaga kesehatan yang berijin, berkompeten dan memenuhi syarat	Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang berijin	25.085.130,00	APBD	DINKES	PUSKEMAS, RSUD, FASKES SWASTA, NAKES PRAKTEK SWASTA, ORGANISASI PROFESI, PPNI, IBI, dll	2022
4	E-JKN untuk pencatatan dan pelaporan pemanfaatan dana kapitasi BPJS	Pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Peserta BPJS Kesehatan	Cakupan UHC (<i>Universal Health Coverage</i>)	30.000.000	APBD	DINKES	PUSKEMAS, BAPENDA, BPKAD, BPJS	2022

Lampiran 7 RSUD. Dr. SOEDARSONO

NO	1.PROGRAM KERJA	2. TUJUAN	3.SASARAN	4. INDIKATOR KEBERHASILAN	5. USULAN ANGGARAN	6. SUMBER PEMBIAYAAN	7. PELAKSANA	8.KERJASAMA	09. TIMELINE
1	layanan <i>e-rekam</i> medis	mempercepat layanan pasien	pasien (pelanggan) rumah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	850.000.000	BLUD	RSUD dr. R. Soedarsono		2021-2022

			sakit						
2	Layanan pengantaran obat pasien rawat jalan khusus pasien di Wilayah Kota Pasuruan	Meningkatkan kemudahan pasien dan keluarga untuk pengambilan obat	pasien (pelanggan) rumah sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	60.000.000	BLUD	RSUD dr. R. Soedarsono		2022
3	layanan home care	meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat	pasien (pelanggan) dengan keterbatasan mobilitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70.000.000	BLUD	RSUD dr. R. Soedarsono		2022
4	revitalisasi pagar rumah sakit	meningkatkan daya tarik masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit	masyarakat dan pasien (pelanggan) rumah sakit	CRR (<i>cost recovery rate</i>)	2.212.840.000	DBHCHT	RSUD dr. R. Soedarsono		2022
5	Pemenuhan layanan OK <i>central</i>	Meningkatkan Pelayanan	pasien (pelanggan)	Indeks Kepuasan Masyarakat	40.500.000	DAK	RSUD dr. R. Soedarsono		2022-2023

		Kesehatan kepada masyarakat	rumah sakit	(IKM)			o		
6	pengembangan layanan rehabilitasi medik	memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan rehabilitasi khususnya masyarakat di Kota Pasuruan	pasien (pelanggan) yang mengalami kondisi tertentu akibat cedera atau penyakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4.000.000.000	DBHCHT	RSUD dr. R. Soedarsono		2023
7	revitalisasi listrik rumah sakit	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat	masyarakat dan pasien (pelanggan) rumah sakit	CRR (<i>cost recovery rate</i>)	4.000.000.000	DAK	RSUD dr. R. Soedarsono		2023
8	layanan klinik eksekutif dan layanan VVIP pasien rawat inap	memenuhi kebutuhan layanan pasien kelas menengah atas	pasien (pelanggan) rumah sakit	CRR (<i>cost recovery rate</i>)	44.000.000.000	DAK	RSUD dr. R. Soedarsono		2024-2025

9	layanan jantung dan pembuluh darah	meningkatkan daya tarik masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit	pasien penyakit jantung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	20.000.000.000	DBHCHT	RSUD dr. R. Soedarsono		2026
10	layanan bedah urologi	meningkatkan daya tarik masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit	pasien penyakit dengan gangguan pada saluran kencing	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	10.000.000.000	DBHCHT	RSUD dr. R. Soedarsono		2026

Lampiran 8 Roadmap Implementasi *Smart City: Smart Society*

NO	1. PROGRAM KERJA	2. TUJUAN	3.SASARAN	4. INDIKATOR KEBERHASILAN	5. USULAN ANGGARAN	6. SUMBER PEMBIAYAAN	7. PELAKSANA	8.KERJASAMA	09. TIMELINE
1	Program Pengembangan Minat Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat	Masyarakat umum	Meningkatnya IKM	250.000.000.000	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penyedia <i>Online Book</i>	2027-2030

NO	1. PROGRAM KERJA	2. TUJUAN	3.SASARAN	4. INDIKATOR KEBERHASILAN	5. USULAN ANGGARAN	6. SUMBER PEMBIAYAAN	7. PELAKSANA	8.KERJASAMA	09. TIMELINE
		t melalui media online							
2	Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah								
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi								
1.	Program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Multikultural yang Harmonis	Meningkatnya Ketenraman dan Ketertiban masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	19.321.475.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan	Tidak Ada	2027-2030
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot			1. Prese ntase pelan ggara n perda yang ditang					

NO	1. PROGRAM KERJA	2. TUJUAN	3.SASARAN	4. INDIKATOR KEBERHASILAN	5. USULAN ANGGARAN	6. SUMBER PEMBIAYAAN	7. PELAKSANA	8.KERJASAMA	09. TIMELINE
	a			ani 2. Presentase anggota satuan polisi pamong praja atau SatPol PP dan perlindungan masyarakat (Linmas) yang ditingkatkan kapasitasny					

NO	1. PROGRAM KERJA	2. TUJUAN	3.SASARAN	4. INDIKATOR KEBERHASILAN	5. USULAN ANGGARAN	6. SUMBER PEMBIAYAAN	7. PELAKSANA	8.KERJASAMA	09. TIMELINE
				a					
	Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota								
	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) Kab/Kota								
1.	Program Pengendalian Penduduk	Terkendalinya Jumlah Penduduk	Masyarakat umum	Menurunkan Jumlah Kelahiran, Menurunkan <i>Unmet Need</i> , Meningkatkan Usia Kawin Pertama	2.095.099.440	APBD / DAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Dispendukcapil	2027-2030

NO	1. PROGRAM KERJA	2. TUJUAN	3.SASARAN	4. INDIKATOR KEBERHASILAN	5. USULAN ANGGARAN	6. SUMBER PEMBIAYAAN	7. PELAKSANA	8.KERJASAMA	09. TIMELINE
				Perempuan			Berencana (DP3AKB)		
2.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	Pada Akhir Periode PEKKA telah mendapatkan bantuan seluruhnya.	1.323.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	Instansi Terkait	2027-2030
3.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya Keluarga Sejahtera	Masyarakat umum	Terwujudnya Keluarga Sejahtera	9.408.069.440	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	-	2027-2030

NO	1. PROGRAM KERJA	2. TUJUAN	3.SASARAN	4. INDIKATOR KEBERHASILAN	5. USULAN ANGGARAN	6. SUMBER PEMBIAYAAN	7. PELAKSANA	8.KERJASAMA	09. TIMELINE
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatnya APK	59.056.484.265	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas PU, Diskominfo	2022-2031
				Menigkatnya APM	259.848.530.766				
				Menurunnya APS	18.397.418.930	APBN			
				Persentase kelulusan peserta didik kejar paket dan kursus	11.258.367.358	APBN			
				Persentase Siswa/Siswi bersertifikat baca Al-Qur'an					
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terpenuhinya fasilitas dan kenyamanan		Rehabilitasi Sarpras SD		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas PU, Diskominfo	2022-2031

NO	1. PROGRAM KERJA	2. TUJUAN	3.SASARAN	4. INDIKATOR KEBERHASILAN	5. USULAN ANGGARAN	6. SUMBER PEMBIAYAAN	7. PELAKSANA	8.KERJASAMA	09. TIMELINE
		belajar/mengajar							
				Rehabilitasi Sarpras SMP		APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas PU, Diskominfo	2022-2031
				Revitalisasi Sekolah rawan banjir	40.000.000	APBN			
				Insentif Guru Ngaji dan TPQ	375.359.760		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Yayasan pendidikan, Ponpes, LKP	
		Terwujudnya Seni dan Budaya yang Lestari	Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan pelestarian terhadap seni budaya	menggalakkan event budaya dan pariwisata	4.676.701.328	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Disparpora, Budayawan	2022-2031

NO	1. PROGRAM KERJA	2. TUJUAN	3.SASARAN	4. INDIKATOR KEBERHASILAN	5. USULAN ANGGARAN	6. SUMBER PEMBIAYAAN	7. PELAKSANA	8.KERJASAMA	09. TIMELINE
				Pengadaan Seragam khas daerah bagi PTK dan Peserta didik	5.690.000.000	APBN			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Terwujudnya kurikulum yang efisien dan mengangk at nilai-nilai kearifan lokal	Meningkatnya kualitas kurikulum bagi siswa PAUD, SD dan SMP	Meningkatnya budi pekerti dan rasa cinta daerah dan bangga akan kotanya kepada anak didik	25.017.000.000	APBN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tenaga Ahli, Kemdikbud, LPMP	2023-2031
				Menanamkan rasa cinta lingkungan dan kebersihan baik pada anak didik maupun pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan					

NO	1. PROGRAM KERJA	2. TUJUAN	3.SASARAN	4. INDIKATOR KEBERHASILAN	5. USULAN ANGGARAN	6. SUMBER PEMBIAYAAN	7. PELAKSANA	8.KERJASAMA	09. TIMELINE
				n					
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kota)	Meningkatkan layanan Pemerlu Kesejahteraan Sosial	Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang belum terverifikasi dan tervalidasi di data kesejahteraan sosial terpadu	Jumlah KPM fakir miskin yang terverifikasi dan tervalidasi di data terpadu kesejahteraan sosial		APBD	DINSOS	Pusdatin KESOS, Di spenduk capil dan lintas sektoral	2022-2026

Lampiran 9 Roadmap Implementasi *Smart City: Smart Environment*

NO	1. PROGRAM KERJA	2. TUJUAN	3.SASARAN	4.INDIKATOR	5. USULAN ANGGARA	6. SUMBER	7. PELAKSANA	8.KERJASAMA	09. TIMELIN
----	------------------	-----------	-----------	-------------	-------------------	-----------	--------------	-------------	-------------

				KEBERHASILAN	N	PEMBIAYAAN	A		E
1	Tata Kelola sampah terintegrasi	Untuk menciptakan pasuruan bersih dan indah	Masyarakat Seluruh wilayah kota Pasuruan	1, Tidak ada lagi sampah di jalan, pemukiman, dan seluruh wilayah pasuruan 2, Lingkungan bersih dan sehat 3, 100 % masyarakat Kota pasuruan peduli sampah	20 M	APBD, APBN	DLHKP	Konsultansi, CSR, Akademisi, Masyarakat	2022-2031
2	Program Kota tanpa kumuh	Penurunan Kawasan kumuh	Kawasan kumuh kurang dari 10 H (Sesuai Perwali Kawasan Kumuh)	Persentase penurunan luas kawasan kumuh perumahan dan pemukiman	75 M	APBD, APBN	DPRKP	Konsultansi, CSR, Pengembangan Prumahan, investor	2022-2031

	Pembangunan Perkampungan Tematik (lanjutan)								
	Perluasan Makam Estate								
	Pembangunan wisata mangrove sepanjang garis pantai								
	Pembangunan kampung kuliner								
	Membangun Aplikasi SPASI (Sistem Pemetaan, As et Prasarana Sarana Infrastruktur)								
	Penyediaan lahan parkir								
3	Program aman bencana	Meminimalisir warga yang terdampak bencana	Masyarakat terdampak bencana	Persentase dampak bencana yang tertangani	10 M	APBD, APBN	BPBD	Konsultansi, Akademisi, CSR, Masyarakat peduli	2022-2031

								bencana (Relawan)	
4	Program ketesediaan energi Terbarukan	Tersedianya enegi terbarukan	Masyara kat Kota Pasurua n	Persentasi Masyarakat yang mengguna kan energi terbarukan	25 M	APBD, APBN	DLHKP	Konsulta n, Akademis i, Masyara kat, Investor	2022-2031

5	Program Ketersedian informasi lingkungan hidup	Tersedianya informasi lingkungan hidup untuk masyarakat	Masyarakat Kota Pasuruan	Persentase inforasi yang dapat diakses oleh masyarakat	2 M	APBD, APBN	DLHKP	Konsultan, Akademisi, Masyarakat, Investor	2022-2031
---	--	---	--------------------------	--	-----	------------	-------	--	-----------

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19650411 199803 2 001